



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/PMK.05/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
2. UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dekonsentrasi.
3. UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja tugas pembantuan.
4. UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja urusan bersama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
6. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
7. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
8. UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan alokasi dana urusan bersama di wilayah kerjanya.
9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
11. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
16. Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
17. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
18. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
19. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
20. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 2

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada:
 - a. Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan serta dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UAKPA;
 - b. UAPPA-W;
 - c. UAPPA-E1; dan/atau
 - d. UAPA.
- (3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DUB berdasarkan usulan kepala daerah, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan/atau
 - b. UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

Pasal 5

Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Pasal 6

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Modul Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1413

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.05/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MODUL PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DAFTAR ISI

BAB I	
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	3
B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	5
C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	7
BAB II	
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN	32
B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	42
C. PEREKAMAN, VERIFIKASI, DAN REKONSILIASI	47
D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN	51
E. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN	52
BAB III	
SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN POKOK	56
B. LAMPIRAN PENDUKUNG – LAPORAN KEUANGAN POKOK	61
BAB IV	
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA	63
B. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W	125
C. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-E1	191
D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA	259



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta tugas-tugasnya secara umum.

A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).

Apabila diperlukan, kepala daerah dapat menunjuk Koordinator Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

UAPPA-W tidak wajib dibentuk dalam hal:

1. Kementerian Negara/Lembaga hanya terdiri dari satuan kerja pusat;
atau
2. Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya terdapat
1 (satu) satuan kerja untuk tiap Eselon I.

Ilustrasi pembentukan UAPPA-W pada Kementerian Negara/Lembaga:

Eselon 1 pada K/L	Satker		Kewajiban pembentukan UAPPA/B- W
	Jumlah	Jenis Kewenangan	
Ilustrasi K/L WWW			
A	2	KD	Wajib
B	3	KD	Wajib
C	4	KD	Wajib
D	5	KD	Wajib
E	3	KD	Wajib
Ilustrasi K/L XXX			
A	2	KD	Wajib
B	1	KD	Tidak Wajib
C	1	KD	Tidak Wajib
	1	DK	
	1	TP	
D	2	KD	Wajib
	1	DK	Tidak Wajib
E	1	KD	Tidak Wajib
Ilustrasi K/L YYY			
A	1	KD	Tidak Wajib
B	1	KD	Tidak Wajib
C	1	KD	Tidak Wajib
D	1	KD	Tidak Wajib
E	1	KD	Tidak Wajib
Ilustrasi K/L ZZZ			
A	1	KD	Tidak Wajib



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

UAKPA merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memiliki wewenang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA adalah kepala satuan kerja.

Untuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama penanggung jawabnya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

a) UAPPA-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan kerja sebagai UAPPA-W. Penanggung jawab UAPPA-W adalah kepala kantor wilayah atau kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.

b) UAPPA-W Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA Dekonsentrasi yang berada di bawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA-W Dekonsentrasi. Penanggung jawab UAPPA Wilayah adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c) UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang berada di bawahnya.

Setiap dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA Wilayah Tugas Pembantuan/Urusan Bersama. Penanggungjawab UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah kepala dinas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam hal ditunjuk Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi yang merupakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi di wilayahnya, penanggung jawabnya adalah gubernur. Dalam hal ditunjuk koordinator UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang merupakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama di wilayahnya, penanggung jawabnya adalah kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

UAPPA-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I, penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)

UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

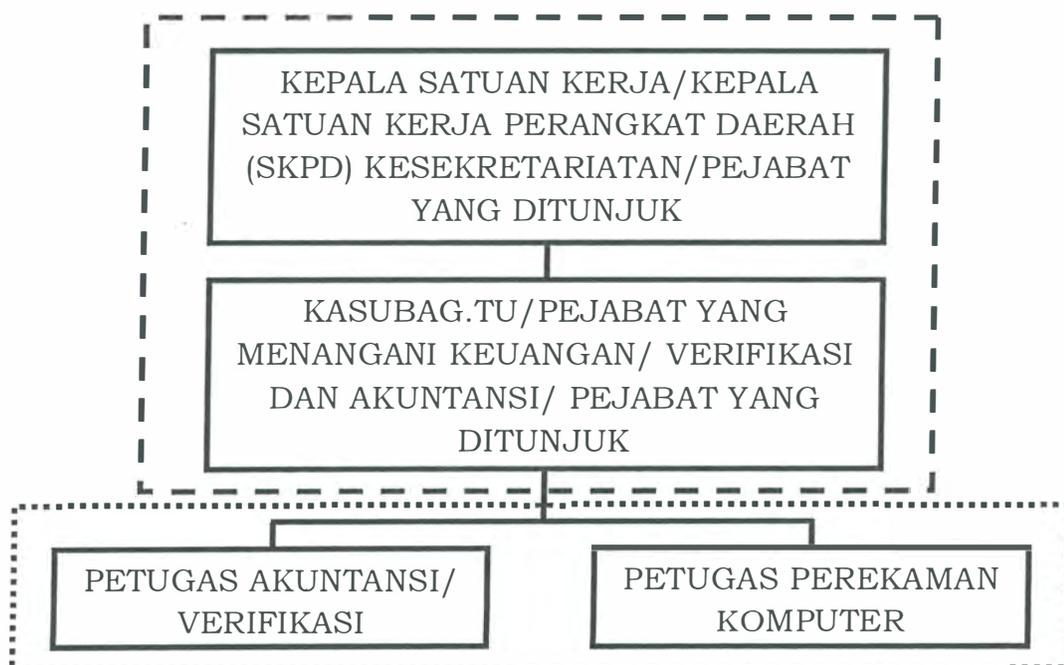
Dengan adanya pembentukan dan penunjukan Unit akuntansi dan pelaporan keuangan, diperlukan adanya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pencantuman struktur organisasi dalam modul ini merupakan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah (untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).

Dalam modul ini hanya dicantumkan struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan sedangkan untuk unit akuntansi dan pelaporan barang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Keterangan:



Penanggung Jawab



Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

1) Kepala SKPD, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b) Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungannya;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
 - g) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN;
 - h) Menelaah Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
 - i) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;
 - j) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan
 - k) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan UAPPA-E1.
- 2) Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
 - b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;
- g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang akan didistribusikan; dan
- h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.

3) Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi;
- 2) Membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
- 4) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan dokumen sumber;
- 5) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

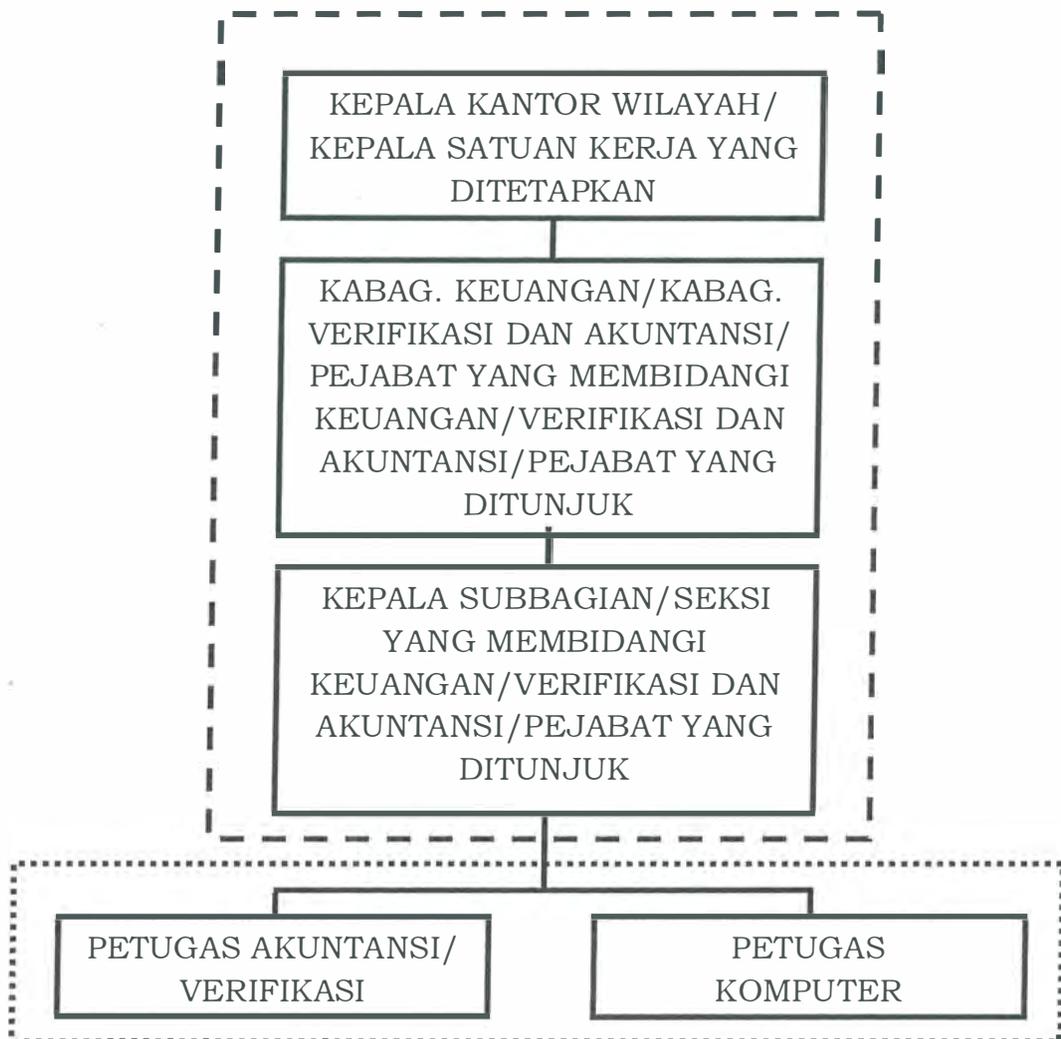
- 6) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 7) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab;
- 8) Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 9) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 10) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 11) Verifikasi atas akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang dicatat dalam memo penyesuaian; dan
- 12) Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. UAPPA-W



Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan

Pada tingkat wilayah, Kementerian Negara/Lembaga menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja sebagai UAPPA-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W disesuaikan dengan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan,
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala,
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UAPPA-W
 - 1) Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan di lingkup UAPPA-W;
 - b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup wilayahnya;
 - d) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - e) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
 - f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- g) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - h) Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1; dan
 - i) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- 2) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
 - b) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA; dan
 - d) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.
- 3) Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
 - b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
 - d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
 - g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; dan
 - h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK kepada UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.
- 4) Petugas Akuntansi Keuangan
- Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA;
 - b) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA;
 - c) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - d) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- e) Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan laporan keuangan dan ADK UAKPA;
- f) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab;
- g) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- h) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; dan
- i) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

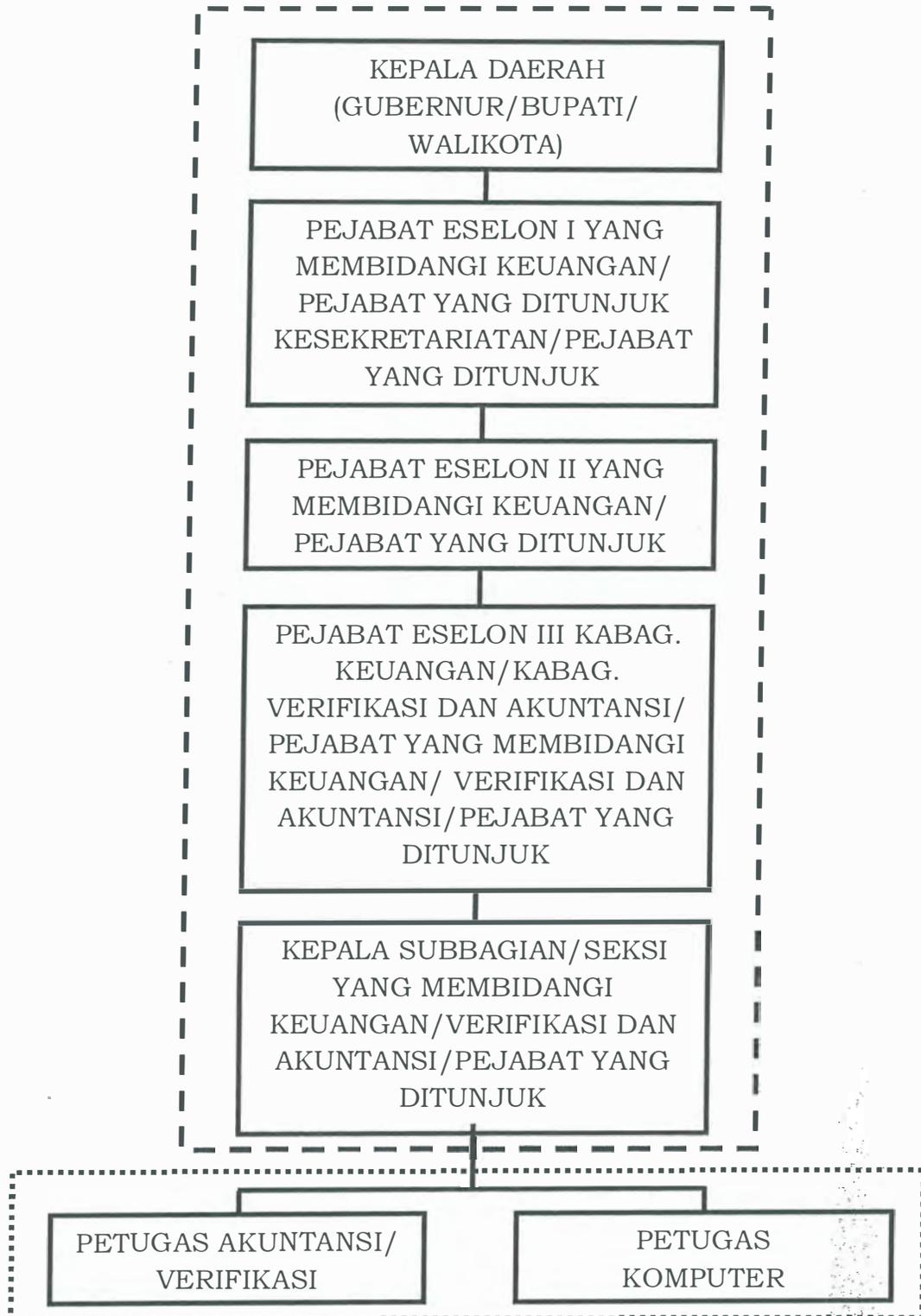
Dalam hal ditunjuk Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama, struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -



Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Tugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat provinsi dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama telah melaksanakan akuntansi keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama untuk provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi/kota/kabupaten dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
 - 1) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b) Menetapkan organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
 - e) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - g) Menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan
 - h) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama ke Kementerian Negara/Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- 2) Pejabat Eselon III/pejabat yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b) Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
 - c) Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
 - d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
 - e) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang di perlukan; dan
 - f) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.
- 3) Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
 - b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat Sistem Akuntansi Keuangan;
 - c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
 - d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan;
 - e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- f) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
- g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang akan didistribusikan; dan
- h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 2) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 3) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 5) Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

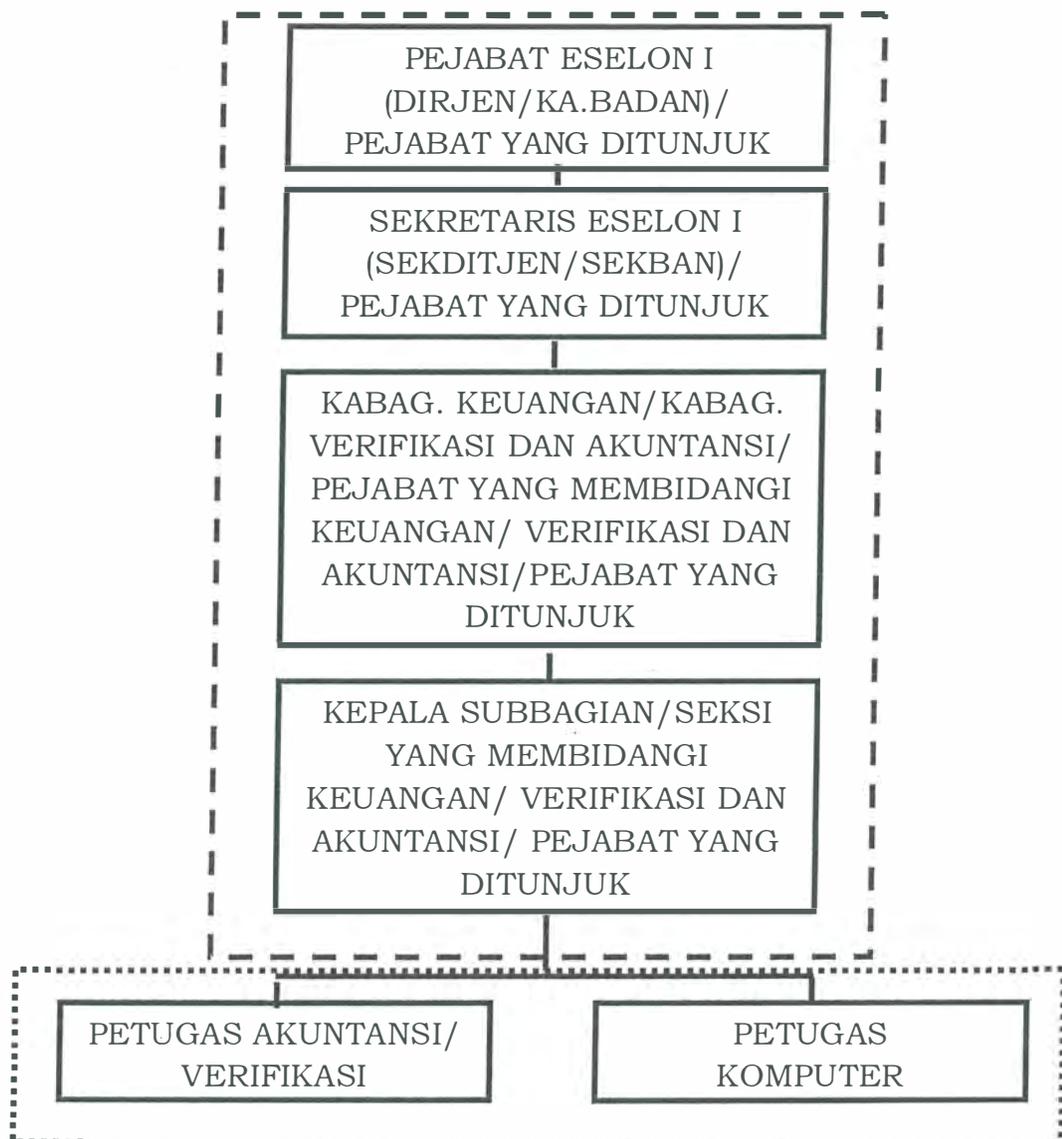


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 6) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab;
- 7) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 8) Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan
- 9) Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

3. UAPPA-E1





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Keterangan:



Penanggung Jawab



Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat unit eselon I dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala; dan
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UAPPA-E1
 - 1) Pejabat eselon I (Direktur Jenderal/Kepala Badan)/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup unit eselon I;
 - b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - d) Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
 - e) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - g) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - h) Menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - i) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- 2) Sekretaris eselon I (Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan)/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
 - b) Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA- E1;
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
 - d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1; dan
 - e) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I.
- 3) Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;
- d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan jika dianggap perlu;
- g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan didistribusikan; dan
- h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 setelah ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I dan ADK ke UAPA.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara Laporan Keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

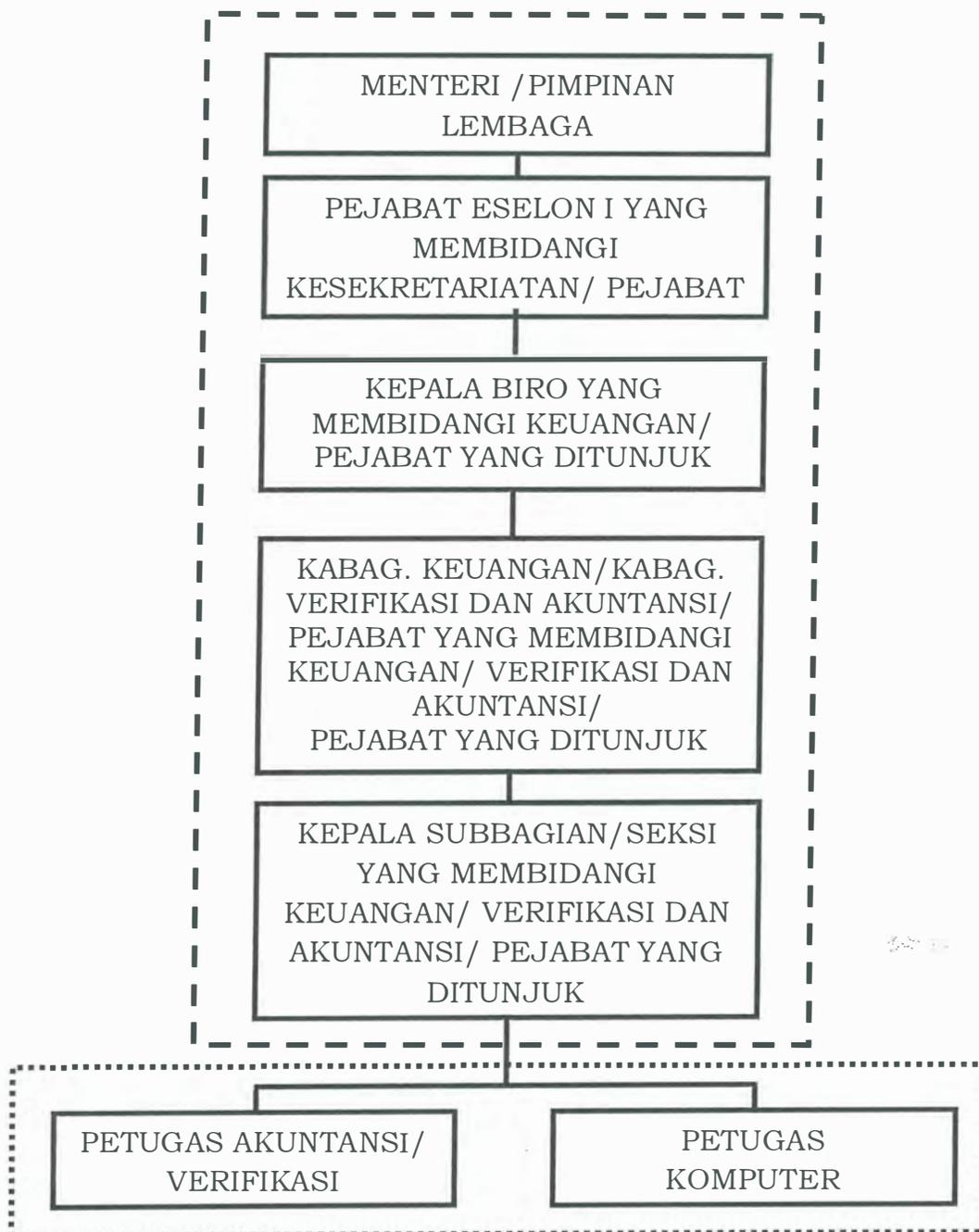
- 2) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 3) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 5) Menyusun Laporan Keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan/atau UAKPA Pusat;
- 6) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab;
- 7) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 8) Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1; dan
- 9) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

4. UAPA





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAPA

- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 - b) Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c) Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d) Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 - e) Menandatangani pernyataan tanggung jawab;
 - f) Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- g) Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- 2) Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 - b) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - e) Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga.
- 3) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
 - b) Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- d) Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- e) Memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
- f) Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan didistribusikan;
- h) Mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
- i) Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester; dan
- l) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAPA yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara Laporan Keuangan dari UAPPA-E1;
- 2) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-E1;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 3) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 5) Menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPA-E1;
- 6) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 7) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab;
- 8) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA; dan
- 9) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN

Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengikuti sistematika laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Bab III modul ini. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan hanya untuk periode pelaporan semesteran (periode yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan) dan untuk periode tahunan (periode yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

2. Laporan selain Laporan Keuangan yang disajikan dengan jenis dan periode penyampaian diatur sebagai berikut:

a. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN

UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama (UB).

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Bulanan	1) LRA Belanja – Bulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3) LRA Pendapatan – Bulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	• ADK • <i>Softcopy</i> laporan dalam bentuk PDF
2)	Laporan Triwulan I dan Laporan Triwulan III	1) LRA Belanja – Triwulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan 3) LRA Pendapatan – Triwulanan	• ADK • Cetak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

	(Khusus Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum)	4) LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	
3)	Laporan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	<ul style="list-style-type: none"> •ADK •Cetakan
4)	Laporan Tahunan	Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	<ul style="list-style-type: none"> •ADK •Cetakan

b. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/
UAPPA E1

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Bulanan - Januari - Februari - April - Mei - Juli - Agustus	1) LRA Belanja – Bulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3) LRA Pendapatan – Bulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> •ADK • <i>Softcopy</i> laporan dalam bentuk PDF



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

	- Oktober - November	5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	
2)	Laporan Triwulanan - Triwulan I - Triwulan III	1. LRA Belanja – Triwulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan 3. LRA Pendapatan – Triwulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan - Bulanan	<ul style="list-style-type: none">• ADK• Cetakan
3)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	<ul style="list-style-type: none">• ADK• Cetakan
4)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	<ul style="list-style-type: none">• ADK• Cetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

c. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan UAPPA-W untuk satker dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP) – selain untuk kode lokasi 0199; Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama (UB).

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Triwulan I dan Laporan Triwulan III	1) LRA Belanja – Triwulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan 3) LRA Pendapatan – Triwulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan	•ADK • <i>Softcopy</i> laporan dalam bentuk PDF
2)	Laporan Semesteran Semester I	Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	•ADK •Cetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

3)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	<ul style="list-style-type: none"> • ADK • Cetakan
----	---	---	--

d. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Bulanan - Januari - Februari - April - Mei - Juli - Agustus - Oktober - November	1) LRA Belanja – Bulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3) LRA Pendapatan – Bulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan – Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • ADK • <i>Softcopy</i> laporan dalam bentuk PDF
2)	Laporan Triwulanan - Triwulan I - Triwulan III	1. LRA Belanja – Triwulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> • ADK • Cetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

		<p>3. LRA Pendapatan – Triwulanan</p> <p>4. LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan</p> <p>5. Laporan Operasional – Bulanan</p> <p>6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan</p> <p>7. Neraca – Bulanan</p> <p>8. Neraca Percobaan – Bulanan</p>	
3)	<p>Laporan Semesteran</p> <p>- Semester I</p>	<p>Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> •ADK •Cetakan
4)	<p>Laporan Tahunan</p> <p>- Tahunan <i>Unaudited</i></p> <p>- Tahunan <i>Audited</i></p>	<p>Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> •ADK •Cetakan

e. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	<p>Laporan Bulanan</p> <p>- Januari</p> <p>- Februari</p> <p>- April</p>	<p>1) LRA Belanja – Bulanan</p> <p>2) LRA Pengembalian Belanja – Bulanan</p> <p>3) LRA Pendapatan – Bulanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •ADK • <i>Softcopy</i> laporan dalam bentuk PDF



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

	- Mei - Juli - Agustus - Oktober - November	4) LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	
2)	Laporan Triwulanan - Triwulan I - Triwulan III	1) LRA Belanja – Triwulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan 3) LRA Pendapatan – Triwulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	• ADK • Cetakan
3)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• ADK • Cetakan
4)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• ADK • Cetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

f. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q.
Ditjen Perbendaharaan

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Triwulanan - Triwulan I - Triwulan III	1) LRA Belanja – Triwulanan 2) LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan 3) LRA Pendapatan – Triwulanan 4) LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan 5) Laporan Operasional – Bulanan 6) Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7) Neraca – Bulanan 8) Neraca Percobaan - Bulanan	• ADK • Cetakan
2)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• ADK • Cetakan
3)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited (Asersi Final)</i>	Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• ADK • Cetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Keterangan:

- 1) Dalam hal antartingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan telah menyelenggarakan *single database*, penyampaian Laporan Keuangan tidak perlu disertai ADK.
- 2) LRA yang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdiri dari LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi.
- 3) LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.
- 4) LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 5) LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO semester I tahun berjalan dengan LO semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 6) LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 7) Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran

- a) LRA Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- b) LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA UAPPA-W, dan LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- c) LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
- d) LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan

- a) LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b) LRA UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA UAPPA-W, dan LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- c) LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
- d) LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

3. Laporan Operasional (LO) Semesteran

- a) LO Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- b) LO UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LO UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LO UAPPA-W, dan LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- c) LO UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d) LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

4. Laporan Operasional (LO) Tahunan

- a) LO Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- b) LO UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LO UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LO UAPPA-W, dan LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- c) LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
- d) LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran

- a) LPE Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b) LPE UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LPE UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LPE UAPPA-W, dan LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- c) LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
- d) LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahunan

- a) LPE Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- b) LPE UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LPE UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LPE UAPPA-W, dan LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- c) LPE UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- d) LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

7. Neraca Semesteran

- a) Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- b) Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, Neraca UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- c) Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- d) Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.

8. Neraca Tahunan

- a) Neraca Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b) Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- c) Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- d) Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

C. PEREKAMAN, VERIFIKASI DAN REKONSILIASI

1. Perekaman dengan Penggunaan Aplikasi Komputer

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal, buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menggunakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkatan struktur organisasi akuntansinya.

- a. Aplikasi Komputer Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Perekaman dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah direkam dan dicatat hanya pada tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi SAIBA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Dengan demikian, perbaikan dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah atau laporan keuangan sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi SAIBA dan dikirimkan kembali hasil perbaikannya berupa arsip data komputer (ADK) secara berjenjang ke unit akuntansi yang lebih tinggi.

b. Aplikasi Komputer SAIBA-W

Dalam rangka menggabungkan data transaksi dan pelaporan keuangan UAKPA di tingkat wilayah, UAPPA-W menerima ADK dari hasil proses aplikasi SAIBA dari UAKPA untuk diterima dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual – Wilayah (SAIBA-W). Dalam hal proses verifikasi dan analisis dilakukan oleh UAPPA-W ditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPPA-W memberitahukan kepada UAKPA untuk melakukan perbaikan yang dimaksud dan meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikan. Selanjutnya UAPPA-W mengirimkan hasil penggabungan ADK dari UAKPA kepada UAPPA-E1.

c. Aplikasi SAIBA-E1

Atas ADK kirim dari UAPPA-W, UAPPA-E1 menerima dan melakukan penggabungan ADK dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Eselon I (SAIBA-E1). Dalam hal proses verifikasi dan analisis oleh UAPPA-E1 ditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPPA-E1 memberitahukan kepada UAPPA-W dan/atau UAKPA untuk melakukan perbaikan yang dimaksud dan meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikan secara berjenjang sesuai struktur unit akuntansinya. UAPPA-E1 mengirimkan hasil penggabungan ADK dari UAPPA-W kepada UAPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

d. Aplikasi SAIBA-K/L

ADK kirim dari aplikasi SAIBA-E1 diterima oleh UAPA dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Kementerian Negara/Lembaga (SAIBA-KL). Dalam hal proses verifikasi dan analisis oleh UAPA ditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPA memberitahukan kepada UAPPA-E1, UAPPA-W dan/atau UAKPA untuk melakukan perbaikan yang dimaksud dan meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikan secara berjenjang sesuai struktur unit akuntansinya. Hasil penggabungan ADK yang telah diverifikasi, dan dianalisis oleh UAPA menjadi dasar pencetakan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2. Verifikasi dan Perekaman Transaksi Laporan Keuangan

Perekaman transaksi Laporan Keuangan berupa data dalam lembaran kertas menjadi data elektronik menggunakan bantuan aplikasi komputer sebagaimana dimaksud dengan penjelasan di atas dilakukan setelah kegiatan verifikasi dan analisis dokumen sumber. Kegiatan verifikasi dimaksud bertujuan:

- a. untuk memastikan bahwa dokumen sumber transaksi Laporan Keuangan yang akan diproses telah lengkap sesuai dengan ketentuan;
- b. untuk memastikan bahwa elemen-elemen data pada dokumen sumber transaksi Laporan Keuangan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Setelah perekaman dokumen sumber transaksi Laporan Keuangan dilakukan, verifikasi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah:

- a. aplikasi komputer sudah sesuai data informasinya dengan dokumen fisiknya; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- b. memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPB hasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAIBA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar aset tetap dan persediaan.

Proses berikutnya adalah mengubah data-data elektronik transaksi keuangan menjadi data-data elektronik akuntansi dengan menjalankan proses *posting* yang ada di program aplikasi komputer sehingga dapat membentuk buku besar sebagai dasar pembentukan Laporan Keuangan.

3. Rekonsiliasi

Kegiatan rekonsiliasi adalah analisis terhadap hasil proses pencatatan/perekaman transaksi laporan keuangan dengan menggunakan berbagai program aplikasi komputer yang berbeda untuk memastikan bahwa nilai yang disajikan tetap sama dan benar. Kegiatan rekonsiliasi harus dilakukan sebelum melakukan proses kirim ADK ke unit akuntansi yang lebih tinggi dan/atau ke kantor vertikal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kompilasi data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rekonsiliasi Internal

Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA, yaitu:

- 1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB) dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAIBA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

2) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan Satker. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan dengan Neraca.

b. Rekonsiliasi Eksternal

Kegiatan rekonsiliasi eksternal dilakukan di tiap unit akuntansi dengan mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data transaksi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja serta aset yang dilaporkan di program aplikasi di tiap unit akuntansi mempunyai nilai dan elemen informasi yang sama dengan program aplikasi mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Triwulan I, disampaikan paling lambat pada tanggal 07 Mei tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
3. Laporan Triwulan III, disampaikan pada paling lambat tanggal 07 November tahun anggaran berjalan; dan
4. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

E. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Laporan Triwulan I

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-	-	12 April 2XX1	
↓				
UAPPA-W	14 April 2XX1	6 hari	20 April 2XX1	2 hari
↓				
UAPPA-E1	22 April 2XX1	4 hari	26 April 2XX1	2 hari
↓				
UAPA	28 April 2XX1	8 hari	07 Mei 2XX1	2 hari
↓				
Menkeu cq. Dirjen PBN	07 Mei 2XX1	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

2. Laporan Keuangan Semester I

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-	-	12 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPA-W	14 Juli 2XX1	6 hari	20 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPA-E1	22 Juli 2XX1	3 hari	25 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPA	27 Juli 2XX1	4 hari	31 Juli 2XX1	
↓				-
Menkeu cq. Dirjen PBN	31 Juli 2XX1	-	-	

3. Laporan Triwulan III

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-	-	12 Oktober 2XX1	
↓				2 hari
UAPPA-W	14 Oktober 2XX1	6 hari	20 Oktober 2XX1	
↓				2 hari
UAPPA-E1	22 Oktober 2XX1	5 hari	27 Oktober 2XX1	
↓				2 hari
UAPA	29 Oktober 2XX1	9 hari	07 November 2XX1	
↓				-
Menkeu cq. Dirjen PBN	07 November 2XX1	-	-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

4. Laporan Keuangan Tahunan (*Unaudited*)

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-	-	20 Januari 2XX2	
↓				2 hari
UAPPA-W	22 Januari 2XX2	7 hari	29 Januari 2XX2	
↓				2 hari
UAPPA-E1	01 Februari 2XX2	7 hari	08 Februari 2XX2	
↓				2 hari
UAPA	10 Februari 2XX2	17 hari		
↓				
Menkeu cq. Dirjen PBN	Tanggal Terakhir Februari 2XX2	-	Tanggal terakhir Februari 2XX2	-

Keterangan:

- Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi/dikonfirmasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan dan rekonsiliasi.
- Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan.
- Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.
- Dalam kondisi tertentu, apabila diperlukan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal penyampaian Laporan Keuangan selain ketentuan di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

BAB III

SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga diarahkan untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diarahkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan akan informasi tambahan yang bersifat manajerial atau informasinya hanya berguna kepada pihak-pihak tertentu. Informasi tambahan tersebut dapat berupa lampiran, daftar, atau dokumen tertentu yang dibutuhkan oleh entitas di atasnya. Tambahan informasi tersebut dimanfaatkan oleh entitas di atasnya dalam penyusunan/penggabungan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang bersifat umum yang sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan dan juga yang bersifat manajerial maka sistematika laporan keuangan dibagi menjadi 2 yaitu:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

1. Laporan Keuangan Pokok yaitu laporan yang disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi tujuan Laporan Keuangan yang bertujuan umum.
2. Lampiran Pendukung-Laporan Keuangan Pokok yaitu berupa lampiran, daftar, atau dokumen tertentu yang berguna dalam penyusunan/kompilasi laporan keuangan dan/atau meningkatkan kualitas laporan .

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran)
2. Pernyataan Tanggung Jawab
3. Ringkasan Laporan Keuangan
4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:

a. Gambaran Umum Entitas

1) Dasar Hukum Entitas

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Di samping itu, juga diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

2) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan entitas.

3) Basis Akuntansi

Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

5) Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

b. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Anggaran;
- 2) Realisasi;
- 3) Persentase pencapaian;
- 4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 5) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan;
- 8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 10) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

c. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca;
 - 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - 5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
- d. Laporan Operasional
- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 3) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - 4) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - 5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - 6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan ekuitas;
 - 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 2) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- 3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- 4) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- 5) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

g. Lampiran dan Daftar

Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang disajikan pada LRA dan Neraca dan pengungkapan lainnya yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku termasuk Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Ikhtisar Badan Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

B. LAMPIRAN PENDUKUNG- LAPORAN KEUANGAN POKOK

Dalam rangka memberikan informasi tambahan yang rinci, entitas dapat menyusun lampiran tambahan sebagai pendukung Laporan Keuangan pokok. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan sebagai laporan dan catatan manajerial agar dipisah dari Laporan Keuangan – Pokok guna memenuhi tujuan Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Dengan demikian, Lampiran Pendukung-Laporan Keuangan merupakan catatan dan arsip manajerial yang disimpan dan diarsipkan oleh masing-masing unit akuntansi instansi.

Informasi tambahan dimaksud dapat berupa:

1. Rincian laporan yang dihasilkan dari aplikasi, antara lain:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN;
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN;
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah);
 - f. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah);
 - g. Neraca; dan
 - h. Neraca Percobaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

2. Laporan Pengguna Barang.
3. Daftar Rekening Pemerintah (dapat dengan *soft copy*).
4. Daftar atau tabel yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal.
5. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Kementerian Negara/Lembaga.
6. Ikhtisar Laporan Badan Lainnya.
7. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

BAB IV
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Ilustrasi Laporan Keuangan berikut hanya merupakan contoh dan agar disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan.

A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31
Desember 2015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Akuntansi Istimewa Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Papua, Januari 2016
Kepala,

Mutiara, MBA
NIP 19750410 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA
GEDUNG YOS. SUDARSO, JL. JAYA WIJAYA NO 15 PAPUA
TELEPON 0967 2263265, 6235234, FAXIMILE 096725081972**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Papua yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Papua, Januari 2016
Kepala,

Mutiara, MBA
NIP 19750410 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Papua Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp335.000.000 atau mencapai 119,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp280.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp8.690.115.000 atau mencapai 91,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.465.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.339.145.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp688.075.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.380.000.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp71.070.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp200.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp128.200.000 dan Rp14.210.945.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp128.300.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.280.174.048 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.151.874.048. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan sebesar Rp77.675.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp9.839.494.048 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp237.885.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.355.115.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp14.210.945.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	280.000.000	335.000.000	119,64	325.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		280.000.000	335.000.000	119,64	325.000.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	825.000.000	810.000.000	98,18	798.000.000
Belanja Barang	B.4	2.990.000.000	2.683.000.000	89,73	2.213.000.000
Belanja Modal	B.5	5.550.000.000	5.097.115.000	91,84	3.115.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	100.000.000	100.000.000	100,00	70.000.000
JUMLAH BELANJA		9.465.000.000	8.690.115.000	91,81	6.196.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

II. NERACA

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	3.000.000	1.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	35.000.000	9.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	65.000.000	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	36.000.000	24.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	12.000.000	9.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(3.250.000)	(1.830.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	114.000.000	152.320.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	3.200.000	5.200.000
Persediaan	C.10	413.125.000	700.000.000
Jumlah Aset Lancar		688.075.000	954.290.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	54.000.000	45.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	18.000.000	25.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(930.000)	(845.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		71.070.000	69.355.000
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.950.000.000	3.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.115.000.000	1.050.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	7.450.000.000	7.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	340.000.000	50.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	90.000.000	90.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	375.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.940.000.000)	(2.324.630.952)
Jumlah Aset Tetap		13.380.000.000	8.865.369.048
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	180.000.000	20.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	145.000.000	110.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(125.000.000)	(60.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		200.000.000	70.000.000
JUMLAH ASET		14.339.145.000	9.959.014.048
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	10.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	35.000.000	12.000.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.26	-	4.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	13.000.000	14.500.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	70.200.000	89.020.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		128.200.000	119.520.000
JUMLAH KEWAJIBAN		128.200.000	119.520.000
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.29	-	834.770.000
Ekuitas Dana Investasi	C.30	-	9.004.724.048
Ekuitas	C.31	14.210.945.000	-
JUMLAH EKUITAS DANA		14.210.945.000	9.839.494.048
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.339.145.000	9.959.014.048



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	128.300.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		128.300.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	815.300.000	-
Beban Persediaan	D.3	451.000.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	600.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	497.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	790.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	345.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	100.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	680.369.048	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.505.000	-
JUMLAH BEBAN		4.280.174.048	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.151.874.048)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	12.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(1.500.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(2.500.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.143.874.048)	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	7.325.000	-
Beban Perjalanan Dinas		(30.000.000)	-
Beban Persediaan		(55.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.121.549.048)	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA PAPUA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	9.839.494.048	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.221.549.048)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	35.000.000	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	277.885.000	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	(125.000.000)	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	35.000.000	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	15.000.000	-
Jumlah Lain-Lain		237.885.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		8.355.115.000	-
EKUITAS AKHIR	E.8	14.210.945.000	9.839.494.048



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Istimewa Papua

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Akuntansi Istimewa Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jaya Wijaya No.15, Jayapura, Papua.

Kantor Akuntansi Istimewa Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Akuntansi Istimewa Papua berkomitmen dengan visi “***mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.***” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Istimewa Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Akuntansi Istimewa Papua* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	235.000.000	235.000.000
Pendapatan Lain-lain	45.000.000	45.000.000
Jumlah Pendapatan	280.000.000	280.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	800.000.000	825.000.000
Belanja Barang	3.500.000.000	2.990.000.000
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal	4.000.000.000	5.550.000.000
Jumlah Belanja	8.400.000.000	9.465.000.000

Realisasi

Pendapatan

Rp335.000.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp335.000.000 atau mencapai 119,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp280.000.000. Pendapatan Kantor Akuntansi Istimewa Papua terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	280.000.000	291.000.000	103,93
Pendapatan Lain-lain	-	44.000.000	-
Jumlah	280.000.000	335.000.000	119,64

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2015 mengalami kenaikan 2,83 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Akuntansi Istimewa Papua mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	291.000.000	283.000.000	2,83
Pendapatan Lain-lain	44.000.000	42.000.000	4,76
Jumlah	335.000.000	325.000.000	3,08

Realisasi

Belanja Negara

Rp8.690.115.000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2015 adalah sebesar Rp8.690.115.000 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp9.465.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

4



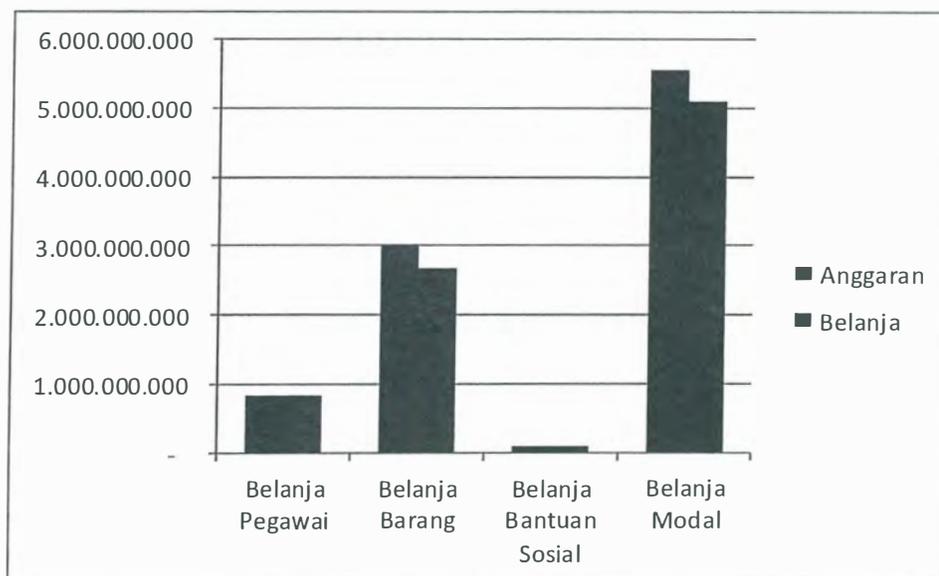
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	825.000.000	835.000.000	101,21
Belanja Barang	2.990.000.000	2.633.000.000	89,73
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	100,00
Belanja Modal	5.550.000.000	5.097.115.000	91,84
Total Belanja Kotor	9.465.000.000	8.715.115.000	92,08
Pengembalian		(25.000.000)	
Jumlah	9.465.000.000	8.690.115.000	91,81

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 40,25% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.100.000.000	798.000.000	1,50
Belanja Barang	2.833.000.000	2.213.000.000	21,24
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	70.000.000	42,86
Belanja Modal	5.097.115.000	3.115.000.000	63,63
Jumlah	8.690.115.000	6.196.000.000	40,25

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp810.000.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp810.000.000 dan Rp798.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	320.000.000	301.000.000	6,31
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	220.000.000	205.700.000	6,95
Belanja Honorarium	174.000.000	165.000.000	5,45
Belanja Lembur	83.000.000	83.000.000	-
Belanja Vakasi	33.000.000	58.300.000	(34,82)
Jumlah Belanja Kotor	835.000.000	813.000.000	2,71
Pengembalian Belanja Pegawai	(25.000.000)	(15.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	810.000.000	798.000.000	1,50



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp2.683.000.000

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.683.000.000 dan Rp2.213.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 21,24% dari Realisasi Belanja Barang TA 2014.

Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	372.000.000	641.300.000	(41,99)
Belanja Barang Non Operasional	129.000.000	98.700.000	30,70
Belanja Jasa	550.000.000	410.000.000	34,15
Belanja Pemeliharaan	497.000.000	339.000.000	46,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	790.000.000	598.000.000	32,11
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	845.000.000	126.000.000	173,81
Jumlah Belanja Kotor	2.683.000.000	2.213.000.000	21,24
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.683.000.000	2.213.000.000	21,24

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp5.097.115.000

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.097.115.000 dan Rp3.115.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 63,63% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.115.000	750.000.000	-9,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	373.000.000	525.000.000	-66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.000.000	200.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	160.000.000	140.000.000	14,29
Jumlah Belanja Kotor	5.097.115.000	3.115.000.000	63,63
Pengembalian			
Jumlah Belanja	5.097.115.000	3.115.000.000	63,63

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.950.000.000 dan Rp1.500.000.000. Realisasi tersebut pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	2.300.000.000	1.100.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	230.000.000	110.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	90.000.000	60.000.000	50,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	200.000.000	150.000.000	33,33
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	130.000.000	80.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp822.115.000, mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp750.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	598.700.000	400.000.000	49,68
Peralatan Komputer	223.415.000	350.000.000	-0,00
Jumlah Belanja Kotor	822.115.000	750.000.000	9,62
Pengembalian			
Jumlah Belanja	822.115.000	750.000.000	9,62

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp875.000.000 dan Rp525.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 40 persen dibandingkan Realisasi TA 2014. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan tiga ruang kelas di sisi kanan bangunan yang telah ada dan ruang kelas tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	875.000.000	525.000.000	40,00
Jumlah Belanja Kotor	875.000.000	525.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja	875.000.000	525.000.000	40,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp290.000.000 dan Rp200.000.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 45,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A. 2014	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	260.000.000	180.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	30.000.000	20.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	290.000.000	200.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja	290.000.000	200.000.000	45,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp160.000.000 dan Rp140.000.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,29 persen dibandingkan Realisasi TA 2014. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp100.000.000

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan TA 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	60.000.000	50.000.000	20,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	40.000.000	20.000.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	100.000.000	70.000.000	42,86
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	100.000.000	70.000.000	42,86

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp10.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2015	TH 2014
Uang Tunai	3.000.000	-
Bank BERSAMA No.acc 82111286163	7.000.000	-
Jumlah	10.000.000	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp3.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp3.000.000 dan Rp1.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2015	TH 2014
Uang Tunai	1.000.000	750.000
Bank BERSAMA No.acc 82111487451	2.000.000	250.000
Jumlah	3.000.000	1.000.000

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp35.000.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp9.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	1.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	12.500.000	2.000.000
Kas Lainnya dari Hibah	17.500.000	5.500.000
Jumlah	35.000.000	9.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Piutang PNBP
Rp65.000.000

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp65.000.000 dan Rp55.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TH 2015	TH 2014
Piutang PNBP	60,000,000	50,000,000
Piutang Lainnya	5,000,000	5,000,000
Jumlah	65,000,000	55,000,000

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp36.000.000

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp24.000.000. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2015 dan 2014

No	Nama	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Jacobus	12.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Karel	9.000.000	9.000.000
4	Darma	6.000.000	6.000.000
5	Julianda	3.000.000	-
6	Okta	6.000.000	6.000.000
	Jumlah	36.000.000	24.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

*Bagian Lancar
TPA
Rp12.000.000*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp12.000.000 dan Rp9.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2015	TH 2014
1	Yohana	3.000.000	3.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Armando	2.400.000	2.400.000
4	Jaka S.	3.000.000	3.000.000
5	Rianti C.	-	1.200.000
Jumlah		12.000.000	9.600.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 3.250.000*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp3.250.000 dan Rp1.830.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	44.736.900	0,50%	223.685
Kurang Lancar	20.263.100	10%	2.026.310
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	65.000.000		2.249.995
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	30.000.000	0,50%	150.000
Kurang Lancar	5.000.000	10%	500.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	35.000.000		650.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	10.000.000	0,50%	50.000
Kurang Lancar	2.000.000	10%	200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	12.000.000		250.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112.000.000		3.150.000

Belanja Dibayar di Muka

Rp114.000.000

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp114.000.000 dan Rp152.320.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pembayaran Internet	20.000.000	23.500.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	40.000.000	74.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	54.000.000	54.820.000
Jumlah	114.000.000	152.320.000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp3.200.000

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp3.200.000 dan Rp5.200.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2015 dan 2014*

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pendapatan Jasa Pelatihan	1.450.000	3.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.750.000	2.200.000
Jumlah	3.200.000	5.200.000

Persediaan

Rp413.125.000

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp413.125.000 dan Rp700.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	124.870.000	375.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	144.700.000	150.000.000
Suku Cadang	92.565.000	90.000.000
Persediaan Lainnya	50.990.000	85.000.000
Jumlah	413.125.000	700.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp500.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Tagihan

TP/TGR

Rp54.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp54.000.000 dan Rp45.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2015 dan 2014

No	Debitur	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Jacobus	24.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Karel	9.000.000	18.000.000
4	Darma	6.000.000	12.000.000
5	Julianda	9.000.000	-
6	Okta	6.000.000	12.000.000
Jumlah		54.000.000	45.000.000

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Rp18.000.000

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp18.000.000 dan Rp25.200.000. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2015	TH 2014
1	Yohana	6.000.000	9.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Armando	2.400.000	4.800.000
4	Jaka S.	6.000.000	9.000.000
5	Rianti C.	-	2.400.000
Jumlah		18.000.000	25.200.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp930.000*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp930.000 dan Rp845.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	50,000,000	0.50%	250,000
Kurang Lancar	4,000,000	10%	400,000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	54,000,000		650,000
Tagihan PA			
Lancar	16,000,000	0.50%	80,000
Kurang Lancar	2,000,000	10%	200,000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	18,000,000		280,000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	72,000,000		930,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Tanah

Rp5.950.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi Istimewa Papua per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp5.950.000.000 dan Rp3.000.000.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2015. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	3.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.950.000.000
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2015	5.950.000.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5.000 m2	Jl Cenderawasih No. 5, Jayapura	1,000,000,000
2	2.000 m2	Jl. Matoa No 17, Jayapura	500,000,000
3	3.000 m2	Jl. Kanguru No 28, Jayapura	750,000,000
4	10,000 m2	Jl. Gunung Intan no. 24, Jayapura	3,700,000,000
Jumlah			5,950,000,000

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl.Matoa NO.17, Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan

Mesin

Rp2.115.000.000

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp2.115.000.000 dan Rp1.050.000.000. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	1.050.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	822.115.000
Hibah Barang	15.000.000
Koreksi tambah	277.885.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(50.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	2.115.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(853.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	1.262.000.000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp700.000.000; dan
- Pembelian peralatan komputer berupa *printer* senilai Rp122.115.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000
- Penerimaan hibah alat angkut darat bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp50.000.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp7.450.000.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp7.450.000.000 dan Rp7.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	7.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	450.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	7.450.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(1.953.750.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	5.496.250.000

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan gedung tempat kerja berupa tiga ruang kelas di sisi kanan gedung induk senilai Rp450.000.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp340.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp340.000.000 dan Rp50.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	50.000.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	290.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	340.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(91.250.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	248.750.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

*Aset Tetap
Lainnya
Rp90.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp90.000.000 dan Rp90.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2015.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp375.000.000*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp375.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan Gedung tersebut sesuai Kontrak No.02/KPA.KAI/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dengan nilai Rp1.000.000.000 dengan sumber dana rupiah murni. Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 37,5%.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.940.000.000*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp2.940.000.000 dan Rp2.324.630.952. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.115.000.000	853.000.000	1.262.000.000
2	Gedung dan Bangunan	7.450.000.000	1.953.750.000	5.496.250.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	340.000.000	91.250.000	248.750.000
4	Aset Tetap Lainnya	90.000.000	42.000.000	48.000.000
Akumulasi Penyusutan		9.995.000.000	2.940.000.000	7.055.000.000

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp180.000.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp180.000.000 dan Rp20.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	20.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	160.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2015	180.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(56.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	124.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBPN senilai RP100.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- Penambahan fitur pada MYOB Accounting Profesional senilai Rp60.000.000.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi Penatausahaan PNB	100.000.000
MYOB Accounting Profesional	80.000.000
Jumlah	180.000.000

Aset Lain-Lain
Rp145.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp145.000.000 dan Rp110.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	110.000.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	50.000.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	(15.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	145.000.000
Akumulasi Penyusutan	(69.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	76.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp50.000.000.
- Penghapusan Alat Angkut Darat Bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp125.000.000*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp125.000.000 dan Rp60.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software komputer	180.000.000	56.000.000	124.000.000
Jumlah	180.000.000	56.000.000	124.000.000
Aset Lain-lain	145.000.000	69.000.000	76.000.000
Jumlah	325.000.000	125.000.000	200.000.000

*Uang Muka dari
KPPN
Rp10.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp35.000.000*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp12.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	20.000.000	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	3.000.000	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	12.000.000	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	35.000.000	

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.000.000. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNPB	3.540.000
PPh yang belum disetor	460.000
Total	4.000.000

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp13.000.000*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.000.000 dan Rp14.500.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
PT Pradnya Consultindo	2.200.000
PT. Dua Dunia	5.500.000
PT Celkomindo Indonesia	5.300.000
Total	13.000.000

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp70.200.000*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp70.200.000 dan Rp89.020.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2015 dan TA 2014*

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	13200000	25.300.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34200000	33.000.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	22800000	30.720.000
Jumlah	70.200.000	89.020.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Ekuitas

Rp14.210.945.000

C. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp14.210.945.000 dan Rp9.839.494.048. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp128.300.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp128.300.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	108.000.000		
Pendapatan Lain-lain	20.300.000		
Jumlah	128.300.000		

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2014.

Beban Pegawai

Rp815.300.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp815.300.000 dan Rp0.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	388.000.000		
Beban Tunjangan-Tunjangan	197.700.000		
Beban Honorarium dan Vakasi	98.230.000		
Beban Lembur	131.370.000		
Jumlah	815.300.000		

Beban

Persediaan

Rp451.000.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp451.000.000 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	255.200.000		
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	98.000.000		
Beban Persediaan Suku Cadang	77.900.000		
Beban Persediaan Lainnya	19.900.000		
Jumlah Beban Persediaan	451.000.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

*Beban Barang
dan Jasa
Rp600.000.000*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	76.700.000		
Beban Langganan Daya dan Jasa	65.000.000		
Beban Jasa Pos dan Giro	31.000.000		
Beban Jasa Konsultan	99.300.000		
Beban Jasa Profesi	265.000.000		
Beban Jasa Lainnya	13.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	30.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	8.000.000		
Jumlah	600.000.000		

*Beban
Pemeliharaan
Rp497.000.000*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp497.000.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.600.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	48.400.000	-	-
Jumlah	497.000.000	-	-

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp790.000.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp790.000.000 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	327.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.000.000	-	-
Jumlah	790.000.000	-	-

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp345.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp345.000.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Akuntansi Istimewa Papua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	307.000.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	38.000.000	-	-
Jumlah	345.000.000		

Beban Bantuan Sosial
Rp100.000.000

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	15.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	30.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	55.000.000	-	-
Jumlah	100.000.000		

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp680.369.048

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp680.369.048 dan Rp0.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	428.119.048	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	149.000.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	15.750.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.500.000	-	-
Jumlah Penyusutan	615.369.048	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	36.000.000	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	29.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	65.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	680.369.048	-	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1.505.000*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.505.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015
dan 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1.420.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	85.000	-	-
Jumlah	1.505.000	-	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp8.000.000*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Angkut Darat	12.000.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor	(1.500.000)	-	-
Defisit Selisih Kurs	(2.500.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8.000.000	-	-

*Pos Luar Biasa
Rp77.675.000*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	7.325.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas	(30.000.000)	-	-
Beban Persediaan	(55.000.000)	-	-
Jumlah	(77.675.000)	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp9.839.494.048

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp9.839.494.048 dan Rp0.

Defisit LO

Rp4.221.549.048

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp4.221.549.048 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp35.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	30.000.000
Suku Cadang	5.000.000
Jumlah	35.000.000

Koreksi Nilai

Aset Tetap

Rp277.885.000

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp277.885.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aet Tetap	Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Koreksi nilai saldo awal	277.885.000
Jumlah	277.885.000

Koreksi Atas

Beban

Rp125.000.000

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp125.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	85.000.000
Beban Jasa	40.000.000
Jumlah	125.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp35.000.000*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	30.000.000
Pendapatan Lainnya	5.000.000
Jumlah	35.000.000

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar
Rp15.000.000*

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Koreksi
Hibah Peralatan dan Mesin	15.000.000
Jumlah	15.000.000

*Ekuitas Akhir
Rp14.210.945.000*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp14.210.945.000 dan Rp9.839.494.048



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Akuntansi Istimewa Papua telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Denny SF

Pejabat Pembuat Komitmen : Fitra

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Komang

Bendahara : Yessy

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Mutiara

Pejabat Pembuat Komitmen : Meini

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Fajar

Bendahara : Martha



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Lampiran A1

**Kantor Akuntansi Istimewa Papua
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember
2015**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2014	Tahun 2015	Per 31-12-2015	Per 31-12-2015
A	Tanah						
1	Tanah	-	5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
	Jumlah		5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	240.000.000	190.714.286	34.285.714	225.000.000	15.000.000
2	Alat Kantor	5	900.000.000	90.000.000	180.000.000	270.000.000	630.000.000
3	Alat Rumah Tangga	5	500.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	350.000.000
4	Alat Komunikasi	5	115.000.000	-	23.000.000	23.000.000	92.000.000
5	Komputer Unit	4	100.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000
6	Peralatan Komputer	4	250.000.000	62.500.000	62.500.000	125.000.000	125.000.000
7	Peralatan Olah Raga	3	10.000.000	6.666.667	3.333.333	10.000.000	-
	Jumlah		2.115.000.000	424.880.952	428.119.048	853.000.000	1.262.000.000
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.450.000.000	1.362.500.000	109.000.000	1.471.500.000	3.978.500.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.000.000.000	442.250.000	40.000.000	482.250.000	1.517.750.000
	Jumlah		7.450.000.000	1.804.750.000	149.000.000	1.953.750.000	5.496.250.000
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	50.000.000	17.500.000	1.250.000	18.750.000	31.250.000
2	Jaringan Telepon	20	290.000.000	58.000.000	14.500.000	72.500.000	217.500.000
	Jumlah		340.000.000	75.500.000	15.750.000	91.250.000	248.750.000
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	375.000.000	-	-	-	375.000.000
	Jumlah		375.000.000	-	-	-	375.000.000
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	4	90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
2		-	-	-	-	-	-
	Jumlah		90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
G	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud*		180.000.000	20.000.000	36.000.000	56.000.000	124.000.000
2	Aset yang dihentikan penggunaannya		145.000.000	40.000.000	29.000.000	69.000.000	76.000.000
	Jumlah		325.000.000	60.000.000	65.000.000	125.000.000	200.000.000
	Total		13.645.000.000	2.334.530.962	630.389.048	3.063.000.000	13.230.000.000

* Beban Amortisasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

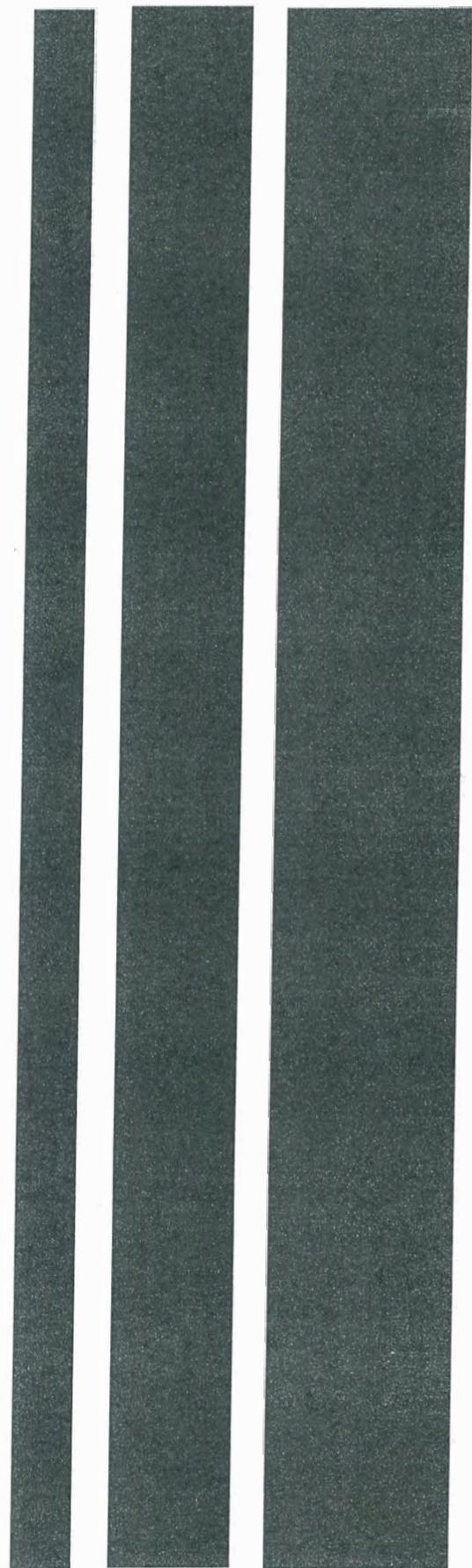
B. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015



Gedung Menara Tinggi, Jl Permai No. 10

Jayapura, Papua 90000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Papua, Januari 2016
Kepala,

Utami, MSc
NIP 1971 0901 199203 2 002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
GEDUNG MENARA TINGGI, JL PERMAI NO. 10, JAYAPURA, PAPUA
TELEPON 0967 5563265, 5335234, FAXIMILE 096733081972**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Papua, Januari 2016
Kepala,

Utami, MSc
NIP 1971 0901 199203 2 002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp750.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau mencapai 98,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.100.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.308.685.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.653.485.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.782.750.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp248.450.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp624.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.109.660.000 dan Rp31.871.525.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp912.530.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.670.030.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.757.500.000. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp16.000.000 dan Rp155.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2014 adalah sebesar Rp19.778.025.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000 kemudian ditambah dengan koreksi koreksi senilai Rp30.990.000.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp31.871.525.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% real/angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	750.000.000	720.000.000	96,00	650.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		750.000.000	720.000.000	96,00	650.000.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7.000.000.000	6.900.000.000	98,57	6.400.000.000
Belanja Barang	B.4	12.800.000.000	12.700.000.000	99,22	12.350.000.000
Belanja Modal	B.5	11.100.000.000	10.790.000.000	97,21	6.230.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	200.000.000	200.000.000	100,00	140.000.000
JUMLAH BELANJA		31.100.000.000	30.590.000.000	98,36	25.120.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	KATEGORI	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	6.000.000	2.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	18.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	120.000.000	110.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	72.000.000	48.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	24.000.000	19.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(11.055.000)	(6.555.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	454.540.000	400.000.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	135.000.000	153.850.000
Persediaan	C.10	1.753.000.000	1.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.653.435.000	1.924.425.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	164.000.000	90.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	92.000.000	50.400.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(7.550.000)	(7.020.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		248.450.000	133.380.000
ASET TETAP			
Tanah	C.14	12.100.000.000	6.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.150.000.000	2.100.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	16.500.000.000	14.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	680.000.000	100.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	210.000.000	180.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	750.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.607.250.000)	(4.501.000.000)
Jumlah Aset Tetap		23.782.750.000	17.879.000.000
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	400.000.000	40.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	390.000.000	220.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(166.000.000)	(67.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		624.000.000	193.000.000
JUMLAH ASET		32.362.635.000	20.449.825.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	20.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	134.080.000	18.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	C.26	-	22.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	164.200.000	165.400.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	118.880.000	166.450.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		437.160.000	371.850.000
JUMLAH KEWAJIBAN		437.160.000	371.850.000
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.29	-	1.572.645.000
Ekuitas Dana Investasi	C.30	-	18.205.380.000
Ekuitas	C.31	31.871.525.000	-
JUMLAH EKUITAS DANA		31.871.525.000	19.778.025.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.163.635.000	20.449.825.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 134 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	912.530.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		912.530.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.940.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	3.487.000.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.924.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	1.755.000.000	-
Beban Perjalanan	D.6	2.834.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.350.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	200.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.175.000.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	5.030.000	-
JUMLAH BEBAN		19.670.030.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		24.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(3.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(5.000.000)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		16.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		15.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas		(60.000.000)	-
Beban Persediaan		(110.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	19.778.025.000	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.896.500.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			-
- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	100.000.000	-
- KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	577.885.000	-
- KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	150.000.000	-
- KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	(30.000.000)	-
- LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	322.115.000	-
Jumlah Lain-lain		1.120.000.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		29.870.000.000	-
EKUITAS AKHIR	E.8	31.871.525.000	19.778.025.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Papua. Melalui peran Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berkomitmen dengan visi:

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2015 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	2500	Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua	-	1	-	-	1
2	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	-	1	-	-	1
3	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	-	1	-	-	1
4	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	-	1	-	-	1
5	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	-	1	-	-	1
6	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	-	1	-	-	1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	700.000.000	700.000.000
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	50.000.000
Jumlah Pendapatan	750.000.000	750.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.500.000.000	7.000.000.000
Belanja Barang	15.000.000.000	12.300.000.000
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000
Belanja Modal	9.000.000.000	11.100.000.000
Jumlah Belanja	30.700.000.000	31.100.000.000

Realisasi

Pendapatan

Rp720.000.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pelatihan akuntansi kepada masyarakat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	700.000.000	620.000.000	88,57
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	100.000.000	200,00
Jumlah	750.000.000	720.000.000	96,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 10.77% dibandingkan realisasi TA 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2015.

Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp30.000.000 menjadi Rp40.000.000 atau sebesar 33.33% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	620.000.000	587.000.000	5,62
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	63.000.000	58,73
Jumlah	720.000.000	650.000.000	10,77

Realisasi

Belanja Negara

Rp30.590.000.000

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau 98.36% dari anggaran belanja sebesar Rp31.100.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:



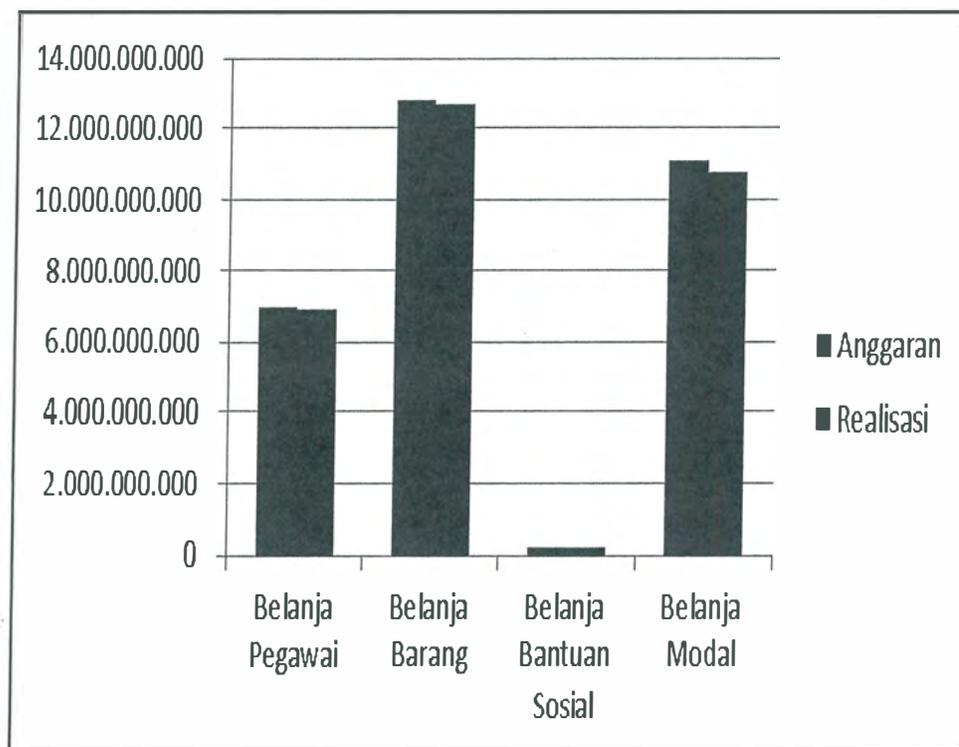
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.000.000.000	6.950.000.000	99,29
Belanja Barang	12.800.000.000	12.700.000.000	99,22
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	100,00
Belanja Modal	11.100.000.000	10.790.000.000	97,21
Total Belanja Kotor	31.100.000.000	30.640.000.000	98,52
Pengembalian Belanja		(50.000.000)	
Total Belanja	31.100.000.000	30.590.000.000	98,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,78% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan social untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.900.000.000	6.400.000.000	7,81
Belanja Barang	12.700.000.000	12.350.000.000	12,83
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	140.000.000	42,86
Belanja Modal	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19
Jumlah	30.590.000.000	25.120.000.000	21,78

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp6.900.000.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.900.000.000 dan Rp6.400.000.000.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen dari realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.934.000.000	4.800.000.000	2,73
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	997.000.000	700.000.000	42,43
Belanja Honorarium	553.300.000	550.000.000	1,51
Belanja Lembur	239.000.000	250.000.000	19,60
Belanja Vakasi	134.700.000	130.000.000	26,69
Jumlah Belanja Kotor	6.950.000.000	6.430.000.000	8,09
Pengembalian Belanja Pegawai	(50.000.000)	(30.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	6.900.000.000	6.400.000.000	7,81

Belanja Barang

Rp12.700.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.700.000.000 dan Rp12.350.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 2,83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2014.

Hal ini antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan peserta sepanjang tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.937.000.000	4.570.000.000	(13,85)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000.000	970.000.000	3,09
Belanja Jasa	1.824.000.000	1.480.000.000	23,24
Belanja Pemeliharaan	1.755.000.000	1.356.000.000	29,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.834.000.000	2.304.000.000	23,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	1.350.000.000	1.670.000.000	(19,16)
Jumlah Belanja Kotor	12.700.000.000	12.350.000.000	2,83
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	12.700.000.000	12.350.000.000	2,83



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Belanja Modal

Rp10.790.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.790.000.000 dan Rp6.230.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 73,19% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.000.000	1.050.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	580.000.000	400.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	360.000.000	280.000.000	28,57
Jumlah Belanja Kotor	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.900.000.000 dan Rp3.000.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 96.67 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4.600.000.000	2.200.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	460.000.000	220.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	180.000.000	120.000.000	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	480.000.000	300.000.000	60,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	180.000.000	160.000.000	12,50
Jumlah Belanja Kotor	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp2.200.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2014 yaitu sebesar Rp1.500.000.000.

Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Adapun penambahan tersebut dalam rangka persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	530.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	800.000.000	500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	100.000.000	70.000.000	42,86
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	600.000.000	400.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp1.050.000.000. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 40 persen yang berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini berlokasi di Kantor Akuntansi Istimewa Papua, Merauke, dan Manokwari.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000	950.000.000	36,67
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	250.000.000	100.000.000	60,00
Jumlah Belanja Kotor	1.750.000.000	1.050.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.750.000.000	1.050.000.000	40,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp580.000.000 dan Rp400.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	520.000.000	360.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	60.000.000	40.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	580.000.000	400.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	580.000.000	400.000.000	45,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan Rp280.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 22 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp200.000.000

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp140.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 42.86% dibandingkan TA 2014. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015
dan 2014*

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua	100.000.000	70.000.000	42,86
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak	40.000.000	30.000.000	33,33
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	50.000.000	40.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	200.000.000	140.000.000	42,86
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	200.000.000	140.000.000	42,86

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp20.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang tunai	6.000.000	-
Rekening Bank	14.000.000	-
Jumlah	20.000.000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp6.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp6.000.000 dan Rp2.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2015	TH 2014
Uang Tunai	1.500.000	864.000
Rekening Bank	4.500.000	1.136.000
Jumlah	6.000.000	2.000.000

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp80.000.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan Rp18.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.000.000	4.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.000.000	5.500.000
Kas Lainnya dari Hibah	41.000.000	8.500.000
Jumlah	80.000.000	18.000.000

Piutang PNBP

Rp120.000.000

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000. dan Rp110.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TH 2015	TH 2014
Piutang PNBP	105.000.000	100.000.000
Piutang Lainnya	15.000.000	10.000.000
Jumlah	120.000.000	110.000.000

Bagian Lancar

TP/TGR

Rp72.000.000

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp48.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Debitur per Satker	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Satker Kanwil Papua	11.000.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	36.000.000	24.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	8.000.000	13.500.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	12.500.000	8.000.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	4.500.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	2.500.000
Jumlah		72.000.000	48.000.000

*Bagian Lancar
TPA
Rp24.000.000*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp19.200.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Debitur per Satker	TH 2015	TH 2014
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	12.000.000	9.600.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	5.700.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	3.800.000	3.800.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	2.500.000	4.500.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	-	1.300.000
Jumlah		24.000.000	19.200.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp11.055.000*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.055.000 dan Rp6.555.000. Penyisihan piutang taktertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	50.000.000	0,50%	250.000
Kurang Lancar	70.000.000	10%	7.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	120.000.000		7.250.000
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	45.000.000	0,50%	225.000
Kurang Lancar	27.000.000	10%	2.700.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	72.000.000		2.925.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	16.000.000	0,50%	80.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	24.000.000		880.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	216.000.000		11.055.000

Belanja Dibayar **C.8 Beban Dibayar di Muka**

di Muka

Rp454.540.000

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp454.540.000 dan Rp400.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pembayaran Internet	80.000.000	160.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	185.000.000	140.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	189.540.000	100.000.000
Jumlah	454.540.000	400.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp135.000.000*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp135.000.000 dan Rp153.850.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015 dan 2014

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pendapatan Jasa Pelatihan	114.740.000	82.810.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	20.260.000	71.040.000
Jumlah	135.000.000	153.850.000

*Persediaan
Rp.1.753.000.000*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp1.753.000.000 dan Rp1.200.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	385.800.000	550.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	486.900.000	300.000.000
Suku Cadang	424.000.000	180.000.000
Persediaan Lainnya	456.300.000	170.000.000
Jumlah	1.753.000.000	1.200.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.100.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan

TP/TGR

Rp164.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp164.000.000. dan Rp90.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Debitur per Satker	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Satker Kanwil Papua	22.500.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	54.000.000	45.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	36.870.000	12.000.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	48.660.000	6.470.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	1.970.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	26.530.000
Jumlah		164.000.000	90.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp92.000.000*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp92.000.000 dan Rp50.400.000.

Rincian TPA untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2015	TH 2014
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	18.000.000	25.200.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	21.200.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	34.450.000	9.600.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	12.350.000	10.800.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	6.000.000	4.800.000
Jumlah		92.000.000	50.400.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp7.550.000*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	120.000.000	0,50%	600.000
Kurang Lancar	44.000.000	10%	4.400.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	164.000.000		5.000.000
Tagihan PA			
Lancar	70.000.000	0,50%	350.000
Kurang Lancar	22.000.000	10%	2.200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	92.000.000		2.550.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	256.000.000		7.550.000

Tanah

Rp12.100.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	6.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	5.900.000.000
Hibah	Rp	200.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	12.100.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	12.100.000.000

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl.Matoa No. 17, Jayapura pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Peralatan dan Mesin **C.15 Peralatan dan Mesin**

Mesin

Rp4.150.000.000

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.150.000.000 dan Rp2.100.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	2.100.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.750.000.000
Hibah	Rp	122.115.000
Transfer Masuk	Rp	100.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	50.000.000
Koreksi tambah	Rp	277.885.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(100.000.000)
Penghapusan	Rp	(150.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	4.150.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	(1.317.900.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	2.832.100.000

Mutasi tambah:

- Pembelian komputer unit senilai Rp200.000.000.
- Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp1.550.000.000.
- Hibah sebesar Rp122.115.000 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST).
- Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar Rp100.000.000.
- Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Mutasi kurang:

- a. Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari penggunaannya sebesar Rp100.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- b. Penghapusan sebesar Rp150.000.000 berupa alat angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp16.500.000.000*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp16.500.000.000 dan Rp14.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	14.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	2.200.000.000
Koreksi pencatatan	300.000.000
Saldo per 31 Desember 2015	16.500.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(4.021.100.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	12.478.900.000

Mutasi tambah:

- a. Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang kelas senilai Rp2.200.000.000.
- b. Koreksi nilai sebesar Rp300.000.000 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp680.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000 dan Rp100.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	100.000.00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	580.000.00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2015	680.000.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(182.250.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	497.750.00

Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp210.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp210.000.000 dan Rp180.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	180.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	30.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	210.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(86.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	124.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp750.000.000*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua dan Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	02/KPA.KAI/2015	1.000.000.000	32,5	325.000.000	KAI PAPUA
2	10/KPA.KAI/2015	850.000.000	50	425.000.000	KAI BIAK
	<i>Jumlah</i>	<i>1.850.000.000</i>		<i>750.000.000</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.607.250.000*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp5.607.250.000 dan Rp4.501.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.150.000.000	Rp 1.317.900.000	Rp 2.832.100.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp 16.500.000.000	Rp 4.021.100.000	Rp 12.478.900.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 680.000.000	Rp 182.250.000	Rp 497.750.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 210.000.000	Rp 86.000.000	Rp 124.000.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 21.540.000.000	Rp 5.607.250.000	Rp 15.932.750.000

*Aset Tak
Berwujud
Rp400.000.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp400.000.000 dan Rp40.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	240.000.000
ATB Lainnya	160.000.000
	400.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2014	Rp	40.000.000
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	360.000.000
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	400.000.000
Amortisasi	Rp	(81.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	319.000.000

Aset Lain-Lain
Rp390.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	Rp	220.000.000
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	250.000.000
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	(50.000.000)
- penghapusan BMN	Rp	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	390.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(85.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	305.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

- b. Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.
- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp30.000.000. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp166.000.000*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp166.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	400.000.000	81.000.000	319.000.000
Aset Lain-lain	390.000.000	85.000.000	305.000.000
Jumlah	790.000.000	166.000.000	624.000.000

*Uang Muka dari
KPPN
Rp20.000.000.*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Akuntansi Istimewa adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2015
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	10.000.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	3.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	7.000.000
Jumlah		20.000.000

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp134.080.000*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp134.080.000 dan Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp 72.280.000
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp 15.000.000
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 46.800.000
Total		Rp 134.080.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp164.200.000*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp164.200.000 dan Rp165.400.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	65.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	24.900.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	73.800.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	164.200.000	

*Beban yang
Masih harus
Dibayar
Rp118.880.000*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp118.880.000 dan Rp188.450.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2015 dan TA 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.745.000	70.010.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.755.000	54.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	41.380.000	64.350.000
Jumlah	118.880.000	188.450.000

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per masing-masing satker disajikan pada lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 177 -

Ekuitas
Rp31.871.525.000

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp912.530.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp912.530.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	596.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain	316.530.000	-	-
Jumlah	912.530.000	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp6.940.000.000

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.940.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.618.700.000	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.271.300.000	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	750.000.000	-	-
Beban Lembur	300.000.000	-	-
Jumlah	6.940.000.000	-	-

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Rp3.487.000.000

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.000.000 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.575.000.000		
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	912.500.000		
Beban Persediaan Suku Cadang	799.500.000		
Beban Persediaan Lainnya	200.000.000		
Jumlah Beban Persediaan	3.487.000.000		

*Beban Barang
dan Jasa*

Rp1.924.000.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.924.000.000 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	407.980.000		
Beban Barang Non Operasional	115.420.000		
Beban Langganan Daya dan Jasa	335.700.000		
Beban Jasa Pos dan Giro	161.600.000		
Beban Jasa Konsultan	250.000.000		
Beban Jasa Profesi	499.200.000		
Beban Jasa Lainnya	54.100.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	60.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	30.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	10.000.000		
Jumlah	1.924.000.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

Beban

Pemeliharaan

Rp1.755.000.000

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.755.000.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	969.300.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	558.900.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	226.800.000	-	-
Jumlah	1.755.000.000	-	-

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp2.834.000.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.834.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.147.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	779.600.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	653.400.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	254.000.000	-	-
Jumlah	2.834.000.000	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp1.350.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.000.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	200.000.000		
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	700.000.000		
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	450.000.000		
Jumlah	1.350.000.000		

*Beban Bantuan
Sosial
Rp200.000.000*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	30.000.000		
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	60.000.000		
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	110.000.000		
Jumlah	200.000.000		

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp1.175.000.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.000.000 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	630.100.000		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335.900.000		
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	68.000.000		
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.000.000		
Jumlah Penyusutan	1.076.000.000		
Beban Amortisasi Aplikasi	54.000.000		
Beban Amortisasi ATB Lainnya	45.000.000		
Jumlah Amortisasi	99.000.000		
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.175.000.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp5.030.000*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	4.500.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	530.000	-	-
Jumlah	5.030.000	-	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp16.000.000*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut	24.000.000		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	(3.000.000)		
Defisit Selisih Kurs	(5.000.000)		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	16.000.000		

Defisit Pos Luar Biasa
Rp155.000.000

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	15.000.000		
Beban Perjalanan Dinas	(60.000.000)		
Beban Persediaan	(110.000.000)		
Jumlah	(155.000.000)		

Terdapat dua Kantor Akuntansi Istimewa yaitu Papua dan Merauke yang menyumbang nilai pada Pos Luar Biasa karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir. Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp19.778.025.000

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.778.025.000 dan Rp0.

Defisit LO

Rp18.896.500.000

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp18.896.500.000 dan Rp0. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp100.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.100.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	50.000.000
2. Suku Cadang	15.000.000
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	30.000.000
4. Barang Persediaan Lainnya	5.000.000
Jumlah	100.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

*Koreksi Nilai
Aset Tetap
Rp577.885.000*

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan penilaian aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp577.885.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

Jenis Koreksi	Nilai
Koreksi tambah	
Peralatan dan Mesin	277.885.000
Gedung dan Bangunan	300.000.000
Total	577.885.000

*Koreksi Atas
Beban
Rp150.000.000*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	95.000.000
Beban Jasa	45.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000
Jumlah	150.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 187 -

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp30.000.000*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas Pendapatan untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	20.000.000
Pendapatan Lain-Lain	10.000.000
Jumlah	30.000.000

*Hibah
Masuk/Keluar
Rp322.115.000*

E.7 Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp322.115.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Nilai
Hibah	
Tanah	200.000.000
Peralatan dan Mesin	122.115.000
Total	322.115.000

*Ekuitas Akhir
Rp31.871.525.000*

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Papua	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Okto
	Bendahara	Yanuraga	Jumina



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2014	Tahun 2015	Per 31-12-2015	Per 31-12-2015
A	Tanah						
1	Tanah	-	12.100.000.000	-	-	-	12.100.000.000
	Jumlah		12.100.000.000				12.100.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	460.000.000	221.450.000	92.900.000	314.350.000	145.650.000
2	Alat Kantor	5	1.200.000.000	110.000.000	211.100.000	321.100.000	878.900.000
3	Alat Rumah Tangga	5	1.088.000.000	102.000.000	124.000.000	226.000.000	862.000.000
4	Alat Komunikasi	5	383.000.000	52.500.000	36.250.000	88.750.000	294.250.000
5	Komputer Unit	4	400.000.000	80.000.000	48.000.000	128.000.000	272.000.000
6	Peralatan Komputer	4	567.000.000	99.272.000	110.500.000	209.772.000	357.228.000
7	Peralatan Olah Raga	3	52.000.000	22.578.000	7.350.000	29.928.000	22.072.000
	Jumlah		4.150.000.000	687.800.000	630.100.000	1.317.900.000	2.832.100.000
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.260.000.000	1.604.000.000	159.200.000	1.763.200.000	5.496.800.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	9.240.000.000	2.081.200.000	176.700.000	2.257.900.000	6.982.100.000
	Jumlah		16.500.000.000	3.685.200.000	335.900.000	4.021.100.000	12.478.900.000
C	Jaringan, Irigasi, dan Jalan						
1	Jaringan Listrik	40	84.000.000	2.250.000	6.476.000	8.726.000	75.274.000
2	Jaringan Telepon	20	596.000.000	81.750.000	61.524.000	173.524.000	422.476.000
	Jumlah		680.000.000	84.000.000	68.000.000	182.250.000	497.750.000
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang Bercorak Kesenian	4	150.000.000	44.000.000	42.000.000	86.000.000	64.000.000
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah		210.000.000	44.000.000	42.000.000	86.000.000	124.000.000
E	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah		750.000.000				750.000.000
F	Aset Lainnya						
1	Aset Tidak Berwujud*	-	400.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	319.000.000
2	Aset Lain-lain	-	390.000.000	40.000.000	45.000.000	85.000.000	305.000.000
	Jumlah		790.000.000	67.000.000	99.000.000	166.000.000	624.000.000
	Jumlah		36.150.000.000	4.663.000.000	1.175.000.000	6.773.250.000	29.476.750.000

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No.	Uraian	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1	Gedung Tempat Kerja	KAI Papua	No.25/KWAI/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	KAI Merauke	No.09/KWAI/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
	Jumlah			1.000.000.000		750.000.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

C. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-E1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Deputi Administrasi

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2015

**Gedung Menara Indah,
Jl. Lapangan Harimau No. 4
Jakarta, 11000**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 193 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Deputi Administrasi BAPK adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Deputi Administrasi BAPK. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Januari 2016
Kepala,

Acelin Kamila
NIP 1965 0901 199203 2 002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 194 -

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
GEDUNG MENARA INDAH, JL.LAPANGAN HARIMAU NO. 4 JAKARTA
TELEPON 021 222065,623455, FAXIMILE 02125052277

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2016
Kepala,

Acelin Kamila
NIP 1965 0901 199203 2 002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Deputy Administrasi BAPK Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp60.974.700.000 atau mencapai 98,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp62.200.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 .

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp62.791.715.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.948.415.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp57.021.400.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp583.900.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.238.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.371.460.000 dan Rp61.420.255.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.026.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp39.324.785.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp38.298.785.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp32.000.000 dan Rp300.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp38.566.785.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp38.738.340.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp38.566.785.000 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp61.248.700.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp61.420.255.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd/Anng	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.500.000.000	1.440.000.000	96,00	1.300.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.500.000.000	1.440.000.000	96,00	1.300.000.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	14.000.000.000	13.800.000.000	98,57	12.800.000.000
Belanja Barang	B.4	25.600.000.000	25.400.000.000	99,22	24.700.000.000
Belanja Modal	B.5	22.200.000.000	21.374.700.000	96,28	12.460.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	400.000.000	400.000.000	100,00	280.000.000
JUMLAH BELANJA		62.200.000.000	60.974.700.000	98,03	50.240.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

II. NERACA

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	40.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	12.000.000	4.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	36.000.000
Piutang PNB	C.4	240.000.000	220.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	144.000.000	96.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	48.000.000	38.400.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(13.845.000)	(7.720.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	604.000.000	557.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	278.300.000	334.500.000
Persediaan	C.10	2.515.960.000	1.800.000.000
Jumlah Aset Lancar		3.948.415.000	3.078.180.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	372.000.000	180.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	224.000.000	100.800.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(12.100.000)	(8.040.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		583.900.000	272.760.000
ASET TETAP			
Tanah	C.14	24.200.000.000	12.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	8.524.000.000	4.200.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	31.980.000.000	28.000.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	1.360.000.000	200.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	420.000.000	360.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	1.500.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(10.962.600.000)	(9.136.600.000)
Jumlah Aset Tetap		57.021.400.000	35.623.400.000
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	720.000.000	80.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	780.000.000	440.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(262.000.000)	(120.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.238.000.000	400.000.000
JUMLAH ASET		62.791.715.000	39.374.340.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	40.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	316.000.000	36.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	717.860.000	280.000.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	297.600.000	320.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.371.460.000	636.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		1.371.460.000	636.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	61.420.255.000	38.738.340.000
JUMLAH EKUITAS		61.420.255.000	38.738.340.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		62.791.715.000	39.374.340.000



III. LAPORAN OPERASIONAL

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.026.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.026.000.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13.880.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	10.100.000.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.594.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	1.982.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.990.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.400.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	400.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.968.600.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	10.185.000	-
JUMLAH BEBAN		39.324.785.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		48.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(6.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(10.000.000)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		32.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		138.297.785.000	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		40.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas		(120.000.000)	-
Beban Persediaan		(220.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(39.996.785.000)	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	38.738.340.000	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38.566.785.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	200.000.000	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	737.885.000	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	162.115.000	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	(60.000.000)	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	674.000.000	-
Jumlah Lain-Lain		1.714.000.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		59.534.700.000	-
EKUITAS AKHIR	E.8	61.420.255.000	38.738.340.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Deputy Administrasi

BAPK

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Deputi Administrasi BAPK didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Lapangan Harimau No.4 Jakarta.

Deputi Administrasi BAPK mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan administrasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Deputi Administrasi BAPK berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Deputi Administrasi BAPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Laporan Keuangan Deputy Administrasi BAPK Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Deputy Administrasi BAPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Deputy Administrasi BAPK Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	02	Deputy Administrasi BAPK	1	-	-	-	1
2	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta		1	-	-	1
3	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Sumatera Utara		1	-	-	1
4	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Kalimantan Timur		1	-	-	1
5	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Bali		1	-	-	1
6	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Nusa Tenggara		1	-	-	1
7	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Papua		6	-	-	6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Deputi Administrasi BAPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Deputi Administrasi BAPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputy Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Deputy Administrasi BAPK adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 207 -

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(9) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Deputy Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.400.000.000
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	100.000.000
Jumlah Pendapatan	1.500.000.000	1.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.500.000.000	14.000.000.000
Belanja Barang	32.000.000.000	25.600.000.000
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000
Belanja Modal	16.000.000.000	22.200.000.000
Jumlah Belanja	61.900.000.000	62.200.000.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Deputy Administrasi maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Kegiatan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	29.700.000.000	30.600.000.000
Kegiatan Manajemen dan Kebijakan di Bidang Pelaporan Keuangan	11.900.000.000	12.000.000.000
Kegiatan Pelatihan di Bidang Akuntansi pada KL	20.300.000.000	19.600.000.000
Total Belanja	61.900.000.000	62.200.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Realisasi

Pendapatan

Rp1.440.000.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000. Pendapatan lingkup Deputi Administrasi BAPK terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.175.000.000	83,93
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	265.000.000	265,00
Jumlah	1.500.000.000	1.440.000.000	96,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,77% persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Deputi Administrasi BAPK. Selain itu, Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 33,33% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1.175.000.000	1.040.000.000	12,98
Pendapatan Lain-lain	265.000.000	260.000.000	1,92
Jumlah	1.440.000.000	1.300.000.000	10,77



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

Realisasi Belanja **B.2. BELANJA**

Rp60.974.700.000

Realisasi Belanjapada TA 2015 adalah sebesar Rp60.974.700.000 atau 98,03% dari anggaran belanja sebesar Rp50.240.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

URAIAN	2015		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	14.000.000.000	13.900.000.000	99,29
Belanja Barang	25.600.000.000	25.400.000.000	99,22
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000	100
Belanja Modal	22.200.000.000	21.374.700.000	96,28
Total Belanja Kotor	62.200.000.000	61.074.700.000	98,19
Pengembalian Belanja		(100.000.000)	0
Total Belanja	62.200.000.000	60.974.700.000	98,03

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Saldo per 31 Desember 2014	200.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	1.160.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2015	1.360.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(184.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	1.176.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2015

PROGRAM	2015		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Kegiatan Implemetasi Akuntansi Berbasis Akrua	26.144.000.000	25.860.000.000	98,91
Kegiatan Manajemen dan Kebijakan di Bidang Pelaporan Keuangan	21.754.700.000	20.145.700.000	92,60
Kegiatan Pelatihan di Bidang Akuntansi pada KL	14.301.300.000	14.969.000.000	104,67
Total Belanja	62.200.000.000	60.974.700.000	98,03

Dibandingkan dengan Tahun 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,62% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81
Belanja Barang	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	280.000.000	42,86
Belanja Modal	21.374.200.000	12.460.000.000	71,54
Jumlah	60.974.200.000	50.240.000.000	21,37



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 219 -

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp13.800.000.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.800.000.000 dan Rp12.800.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,81% dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.000.000.000	9.600.000.000	4,17
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.800.000.000	1.789.000.000	0,61
Belanja Honorarium	1.200.000.000	698.000.000	71,92
Belanja Lembur	600.000.000	513.000.000	16,96
Belanja Vakasi	300.000.000	260.000.000	15,38
Jumlah Belanja Kotor	13.900.000.000	12.860.000.000	8,09
Pengembalian Belanja Pegawai	(100.000.000)	(60.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Belanja Barang
Rp25.400.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp25.400.000.000 dan Rp24.700.000.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 2,83% dari TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang operasional peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan diklat sepanjang tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	10.400.000.000	6.900.000.000	50,72
Belanja Barang Non Operasional	2.234.000.000	2.620.000.000	(14,73)
Belanja Jasa	2.394.000.000	2.960.000.000	(19,12)
Belanja Pemeliharaan	1.982.000.000	5.920.000.000	(66,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.990.000.000	3.920.000.000	52,81
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	2.400.000.000	2.380.000.000	0,84
Jumlah Belanja Kotor	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83

Belanja Modal
Rp21.374.700.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp21.374.700.000 dan Rp12.460.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mmeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 71,55% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000	2.100.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.160.000.000	800.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	514.700.000	560.000.000	(8,09)
Jumlah Belanja Kotor	21.374.700.000	12.460.000.000	71,55
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	21.374.700.000	12.460.000.000	71,55

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.800.000.000 dan Rp6.000.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan
2014*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	9.200.000.000	4.400.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	720.000.000	340.000.000	111,76
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	200.000.000	300.000.000	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.160.000.000	640.000.000	81,25
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	520.000.000	320.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp4.400.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46,67 persen bila dibandingkan dengan TA 2014 sebesar Rp3.000.000.000. Hal ini disebabkan oleh pengadaan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.450.000.000	1.052.000.000	37,83
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	1.550.000.000	889.000.000	74,35
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	200.000.000	169.000.000	18,34
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	1.200.000.000	890.000.000	34,83
Jumlah Belanja Kotor	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000.000 dan Rp2.100.000.000. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan gedung tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA
2015 dan 2014*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000.000	1.550.000.000	61,29
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	300.000.000	100.000.000	200,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	250.000.000	220.000.000	13,64
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	300.000.000	130.000.000	130,77
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	150.000.000	100.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	3.500.000.000	2.100.000.000	66,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.500.000.000	2.100.000.000	66,67

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.160.000.000 dan Rp800.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2015 dan 2014*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A. 2014	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	1.040.000.000	720.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	120.000.000	80.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	1.160.000.000	800.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.160.000.000	800.000.000	45,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 224 -

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp514.700.000 dan Rp560.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 13 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	394.700.000	514.200.000	-23,24
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	120.000.000	45.800.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	514.700.000	560.000.000	-8,09
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	514.700.000	560.000.000	-8,09

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp400.000.000*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp280.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan TA 2014. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan
2014*

URAIAN JENIS BELANJA	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	198.000.000	150.000.000	32,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	112.000.000	50.000.000	124,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	90.000.000	80.000.000	12,50
Jumlah	400.000.000	280.000.000	42,86

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp40.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2015 dan
2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Rekening Bank	15.000.000	-
Uang Tunai	25.000.000	-
Jumlah	40.000.000	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp12.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp12.000.000 dan Rp4.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA
2015 dan 2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai	2.000.000	1.500.000
Rekening Bank	10.000.000	2.500.000
Jumlah	12.000.000	4.000.000

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp80.000.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp80.000.000 dan Rp36.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015 dan
2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.000.000	6.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.000.000	14.500.000
Kas Lainnya dari Hibah	41.000.000	15.000.000
Jumlah	80.000.000	36.000.000

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada kanwil disajikan dalam lampiran.

*Piutang PNBP
Rp240.000.000*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp240.000.000 dan Rp220.000.000. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2015 dan 2014

Uraian	TH 2015	TH 2014
Piutang PNBP	200.000.000	190.000.000
Piutang Lainnya	40.000.000	30.000.000
Jumlah	240.000.000	220.000.000

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp144.000.000*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp144.000.000. dan Rp96.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 228 -

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2015 dan 2014

No	Nama	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Bagian Lancar TP	64.000.000	41.000.000
2	Bagian Lancar TGR	80.000.000	55.000.000
Jumlah		144.000.000	96.000.000

Rincian TP/TGR untuk masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

*Bagian Lancar
TPA
Rp48.000.000*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp48.000.000 dan Rp38.400.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian TPA untuk masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp13.845.000*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.845.000 dan Rp7.720.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA
2015*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	160.000.000	0,50%	800.000
Kurang Lancar	80.000.000	10%	8.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	240.000.000		8.800.000
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	109.000.000	0,50%	545.000
Kurang Lancar	35.000.000	10%	3.500.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	144.000.000		4.045.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	40.000.000	0,50%	200.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	48.000.000		1.000.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	432.000.000		13.845.000

Belanja Dibayar **C.8 Beban Dibayar di Muka**

di Muka

Rp604.000.000

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp604.000.000 dan Rp557.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 230 -

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2015 dan
2014*

JENIS	TH 2015	TH 2014
Pembayaran Internet	154.000.000	120.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	239.100.000	280.000.000
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	210.900.000	157.000.000
Jumlah	604.000.000	557.000.000

Rincian Beban Dibayar di Muka pada masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp278.300.000*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp278.300.000 dan Rp334.500.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2015 dan 2014*

JENIS	TH 2015	TH 2014
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	155.000.000	70.000.000
Pendapatan Jasa Pelatihan	89.100.000	150.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	34.200.000	114.500.000
Jumlah	278.300.000	334.500.000

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing kanwil disajikan dalam lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 231 -

Persediaan

C.10 Persediaan

Rp2.515.960.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp2.515.960.000 dan Rp1.800.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014

JENIS	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	595.500.000	600.600.000
Barang untuk Pemeliharaan	639.100.000	635.500.000
Suku Cadang	670.460.000	332.500.000
Persediaan Lainnya	610.900.000	231.400.000
Jumlah	2.515.960.000	1.800.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.000.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Rincian Persediaan berdasarkan kanwil disajikan pada lampiran.

Tagihan

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR

Rp372.000.000.

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp372.000.000 dan Rp180.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp224.000.000*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp224.000.000 dan Rp100.800.000.

Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Non
Lancar
Rp12.100.000*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.000 dan Rp8.040.000. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	310,000,000	0.50%	1,550,000
Kurang Lancar	62,000,000	10%	6,200,000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	372,000,000		7,750,000
Tagihan PA			
Lancar	190,000,000	0.50%	950,000
Kurang Lancar	34,000,000	10%	3,400,000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	224,000,000		4,350,000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	596,000,000		12,100,000

Tanah

Rp24.200.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Deputi Administrasi BAPK per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp24.200.0000.000 dan Rp12.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	12.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	11.800.000.000
Hibah	Rp	400.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	24.200.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	24.200.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2015 berlokasi di provinsi yaitu Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tanah seluas 2000 m² yang terletak di Jl Matoa No.17 pada Kanwil Akuntansi Istimewa Papua, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin
Rp8.524.000.000*

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.524.000.000 dan Rp4.200.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	4.200.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	4.400.000.000
Hibah	Rp	274.000.000
Transfer Masuk	Rp	100.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	50.000.000
Koreksi Tambah	Rp	277.885.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(200.000.000)
Penghapusan	Rp	(577.885.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	8.524.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	(1.967.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	6.557.000.000

Mutasi tambah berupa:

- a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Komputer Unit	400.000.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000.000
Jumlah		4.400.000.000

- b. Penambahan alat rumah tangga melalui hibah sebesar Rp274.000.000.
- c. Penambahan melalui transfer masuk dari satker Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp100.000.000.
- d. Reklasifikasi masuk dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp50.000.000.
- e. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000

Mutasi kurang, berupa:

- a. Pengurangan melalui penghentian alat pemancar dari penggunaannya sebesar Rp200.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke Aset Lain-Lain.; dan
- b. Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp577.885.000. merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp31.980.000.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp31.980.000.000 dan Rp28.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Saldo per 31 Desember 2014	28.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	3.500.000.000
Koreksi nilai	600.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	(120.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	31.980.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(8.639.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	23.340.400.000

Mutasi tambah berupa:

- Penambahan dari pengadaan gedung dan bangunan senilai Rp3.500.000.000 untuk pembangunan dan renovasi unit kantor kerja; dan
- Penambahan yang disebabkan karena koreksi nilai sebesar Rp600.000.000.

Mutasi kurang, berupa koreksi pencatatan pada gedung tempat tinggal sebesar Rp120.000.000.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk musholla yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Kantor Akuntansi Istimewa Jakarta lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp1.360.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.360.000.000 dan Rp200.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	200.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	1.160.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2015	1.360.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(184.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	1.176.000.000

Mutasi tambah berasal dari pengadaan jaringan teknologi informasi senilai Rp1.160.000.000 pada lingkup Deputi Administrasi BAPK.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya Rp
420.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp420.000.000 dan Rp360.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Saldo per 31 Desember 2014	360.000.000
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	80.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	(20.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	420.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(172.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	248.000.000

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2015 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp80.000.000 berupa koleksi buku perpustakaan.

Mutasi kurang:

- Mutasi kurang berasal dari koreksi nilai sebesar Rp20.000.000.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp1.500.000.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp10.962.600.000*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp10.962.600.000 dan Rp9.136.000.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.524.000.000	1.967.000.000	6.557.000.000
2	Gedung dan Bangunan	31.980.000.000	8.639.600.000	23.340.400.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.360.000.000	184.000.000	1.176.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	420.000.000	172.000.000	248.000.000
Akumulasi Penyusutan		42.284.000.000	10.962.600.000	31.321.400.000

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Aset Tak
Berwujud
Rp720.000.000.*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp720.000.000 dan Rp80.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2015

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 553.000.000
2	ATB Lainnya	Rp 167.000.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2015		Rp 720.000.000

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	Rp 80.000.000
Mutasi tambah:	
pembelian	Rp 514.700.000
Transfer Masuk	Rp 125.300.000
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 720.000.000
Amortisasi	Rp (120.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp 600.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian aplikasi berupa manajemen piutang di lingkup Deputi Administrasi BAPK senilai Rp514.700.000; dan
- Penambahan melalui transfer masuk dari satker Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp125.300.000.

Aset Lain-Lain
Rp780.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp780.000.000 dan Rp440.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Deputi Administrasi BAPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	440.000.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	500.000.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(100.000.000)
- penghapusan BMN	(60.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	780.000.000
Akumulasi Penyusutan	(142.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	638.000.000

Mutasi tambah berasal dari:

- d. Penambahanyang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya berupa:

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Mesin	200,000,000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	300,000,000
Jumlah		500,000,000

Mutasi kurang berasal dari:

- Pengurangan melalui reklasifikasi ke peralatan dan mesin yang merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp100.000.000.
- Pengurangan berupa penghapusan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp60.000.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp262.000.000*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp262.000.000 dan Rp120.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	553.000.000	95.000.000	458.000.000
2	ATB Lainnya	167.000.000	25.000.000	142.000.000
	Jumlah	720.000.000	120.000.000	600.000.000
B	Aset Lainnya	780.000.000	142.000.000	638.000.000
	Jumlah	780.000.000	142.000.000	638.000.000
	Total	1.500.000.000	262.000.000	1.238.000.000

*Uang Muka dari
KPPN
Rp40.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp316.000.000

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp316.000.000. dan Rp36.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Deputy Administrasi, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing disajikan pada lampiran.

Pendapatan

Diterima di

Muka

Rp717.860.000

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp717.860.000 dan Rp280.000.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Deputy Administrasi merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2015

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp 387.760.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 202.000.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	Rp 128.100.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	Rp 717.860.000	

Rincian per kanwil disajikan pada lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

*Beban yang
Masih harus
Dibayar
Rp297.600.000*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp297.600.000 dan Rp320.000.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2015 dan TA
2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	35.000.000	109.400.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	154.000.000	100.200.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	108.600.000	110.400.000
Jumlah	297.600.000	320.000.000

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran

*Ekuitas
Rp61.420.255.000*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp61.420.255.000 dan Rp38.738.340.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp1.026.000.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.026.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			
Pendapatan Jasa Pelatihan			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan			
Jumlah Pendapatan Jasa			
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu			
Jumlah Pendapatan Lain-Lain			
Jumlah	1.026.000.000		

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan pendapatan lain-lain-LO merupakan pengembalian belanja yang berasal dari transaksi tahun 2014.

Beban Pegawai

Rp13.880.000.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.880.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2015 dan TA
2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	12.980.000.000	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	1.500.000.000	-	-
Beban Lembur	600.000.000	-	-
Jumlah	13.880.000.000	-	-

Beban

Persediaan

Rp10.100.000.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.100.000.000 dan 0.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA
2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7.200.000.000	-	-
Beban Persediaan Pemeliharaan	958.000.000	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	1.450.000.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	492.000.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	10.100.000.000	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa

Rp2.594.000.000

Beban Barang dan jasa Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.594.000.000 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Beban Barang Oreasional	0	0	
Beban Barang Non Operasional	0	0	
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	
Beban Jasa Konsultan	0	0	
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	
Beban Jasa Profesi	0	0	
Beban Jasa Lainnya	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Beban Jasa Lainnya	0	0	
Jumlah	2.594.000.000	0	

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp1.982.000.000

Beban pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.982.000.000 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagaiberikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan
TA 2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Beban Pemeliharaan Lainnya			
Jumlah	1.982.000.000		

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp5.990.000.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.990.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015
dan TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.395.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.045.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	930.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	620.000.000	-	-
Jumlah	5.990.000.000	-	-

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp2.400.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.400.000.000 dan Rp0.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Deputy Administrasi BAPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	432.000.000	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.200.000.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	768.000.000	-	-
Jumlah	2.400.000.000	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp400.000.000

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 250 -

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan
TA 2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial			
Jumlah	400.000.000		

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp1.968.600.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.968.600.000 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2015 dan TA 2014*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan			
Beban Amortisasi Aplikasi			
Bel Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu			
Jumlah Amortisasi			
Jumlah	1.968.600.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertagih
Rp10.185.000

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.185.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah	10.185.000		

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp32.000.000*

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 252 -

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional TA 2015 dan TA 2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	48.000.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	(6.000.000)	-	-
Defisit Selisih Kurs	(10.000.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	32.000.000	-	-

*Pos-Pos Luar
Biasa
Rp300.000.000*

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2015 dan TA
2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	40.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas	(120.000.000)	-	-
Beban Persediaan	(220.000.000)	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	(300.000.000)	-	-

Pendapatan PNB berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan adalah merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp38.738.340.000

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp38.738.340.000 dan Rp0.

Defisit LO

Rp38.566.785.000

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp38.566.785.000 dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp200.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.200.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2015

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	100.000.000
2. Suku Cadang	30.000.000
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	60.000.000
4. Barang Persediaan Lainnya	10.000.000
Jumlah	200.000.000



Koreksi Nilai

Aset Tetap

Rp737.885.000

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp737.885.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap TA 2015

URAIAN	NILAI KOREKSI
Koreksi tambah	
Peralatan dan Mesin	277.885.000
Gedung dan Bangunan	600.000.000
Jumlah Koreksi Tambah	877.885.000
Koreksi Kurang	
Gedung dan Bangunan	(120.000.000)
Aset Tetap Lainnya	(20.000.000)
Jumlah Koreksi Kurang	(140.000.000)
Jumlah	737.885.000

Koreksi Atas

Beban

Rp162.115.000

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp162.115.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban TA 2015

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	95.000.000
Beban Jasa	45.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	22.115.000
Jumlah	162.115.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp60.000.000*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan TA 2015

URAIAN	NILAI KOREKSI
Pendapatan Jasa Pelatihan	(40.000.000)
Pendapatan Lain-Lain	(20.000.000)
Jumlah	(60.000.000)

*Koreksi Lain-lain
- Hibah
Masuk/Keluar
Rp674.000.000*

E.4 Koreksi Nilai Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Nilai Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp674.000.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar TA 2015

URAIAN	NILAI KOREKSI
Hibah	
Tanah	400.000.000
Peralatan dan Mesin	274.000.000
Jumlah	674.000.000

*Ekuitas Akhir
Rp61.420.255.000*

D.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp61.420.255.000 dan Rp38.738.340.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Deputy Administrasi BAPK telah membentuk tim untuk untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 236/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Deputy Administrasi BAPK pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Papua	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Okto
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Kantor Akuntansi Istimewa Denpasar	Kuasa Pengguna Anggaran	Astuti	Acelin Kamila
	Pejabat Pembuat Komitmen	Tira	Sugi
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Silvina	Fathin
	Bendahara	Imam	Aydin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 258 -

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Deputi Administrasi BAPK
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2014	Tahun 2015	Per 31-12-2015	Per 31-12-2015
A	Tanah						
1	Tanah	-	24.200.000.000	-	-	-	24.200.000.000
	Jumlah		24.200.000.000				24.200.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	920.000.000	294.000.000	138.000.000	432.000.000	488.000.000
2	Alat Kantor	5	2.600.000.000	188.000.000	310.000.000	498.000.000	2.102.000.000
3	Alat Rumah Tangga	5	2.704.000.000	184.000.000	231.000.000	415.000.000	2.289.000.000
4	Alat Komunikasi	5	466.000.000	79.000.000	68.500.000	147.500.000	318.500.000
5	Komputer Unit	4	800.000.000	118.000.000	76.000.000	194.000.000	606.000.000
6	Peralatan Komputer	4	934.000.000	102.000.000	131.000.000	233.000.000	701.000.000
7	Peralatan Olah Raga	3	100.000.000	35.000.000	12.500.000	47.500.000	52.500.000
	Jumlah		8.824.000.000	1.006.000.000	987.000.000	1.987.000.000	6.837.000.000
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	15.120.000.000	3.888.000.000	302.400.000	4.190.400.000	10.929.600.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	16.860.000.000	4.112.000.000	337.200.000	4.449.200.000	12.410.800.000
	Jumlah		31.980.000.000	8.000.000.000	639.600.000	8.639.600.000	23.340.400.000
C	Jaringan, Irigasi, dan Jalan						
1	Jaringan Listrik	40	168.000.000	4.500.000	12.952.000	17.452.000	150.548.000
2	Jaringan Telepon	20	1.192.000.000	43.500.000	123.048.000	166.548.000	1.025.452.000
	Jumlah		1.360.000.000	48.000.000	136.000.000	184.000.000	1.176.000.000
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang Bercorak Kesenian	4	300.000.000	88.000.000	84.000.000	172.000.000	128.000.000
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah		420.000.000	88.000.000	84.000.000	172.000.000	248.000.000
E	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	Jumlah		1.500.000.000				1.500.000.000
F	Aset Lainnya						
1	Aset Tidak Berwujud*	-	720.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000	600.000.000
2	Aset Lain-lain	-	780.000.000	80.000.000	62.000.000	142.000.000	638.000.000
	Jumlah		1.500.000.000	120.000.000	142.000.000	262.000.000	1.238.000.000
	Total		69.484.000.000	9.268.000.000	1.988.600.000	11.224.600.000	58.259.400.000

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Deputi Administrasi BAPK
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	KDP	Satker	No Kontrak	Nilai Kontrak	% Pnyles.	Nilai KDP	Sumber Dana
1	Gedung Tempat Kerja	Kanwil AI Provinsi Papua	No.21/DA/VII/2015	500.000.000	80%	400.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	Kanwil AI Provinsi Jakarta	No.05/DA/VI/2015	1.200.000.000	50%	600.000.000	Rupiah Murni
3	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil AI Provinsi Papua	No.14/DA/VIII/2015	400.000.000	50%	200.000.000	Rupiah Murni
4	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil AI Provinsi Bali	No.17/DA/XII/2015	312.500.000	80%	250.000.000	Pinj.LN
	Jumlah			2.412.500.000		1.500.000.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

2015

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2015

Jl. Budi Utomo. No. 6
Jakarta - 10710





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2016
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Telah Direviu	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2016

Eriksiawan, CA, CPA
Nip.1965082519851001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2016
Kepala,

Wulandari, CPA, MBA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.850.000.000 atau mencapai 126,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.250.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp90.812.700.000 atau mencapai 97,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp93.300.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp96.610.357.500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.664.116.750; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.682.240.750; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp763.000.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.501.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.919.779.000 dan Rp91.690.578.500.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.965.200.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp59.856.499.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp55.891.299.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.000.000 dan Rp120.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp55.973.299.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp56.914.378.500, ditambah Defisit-LO sebesar Rp56.000.500.000, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas senilai total Rp90.776.700.000, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp91.690.578.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	19.000.000.000	18.457.200.000	97,14	19.200.000.000
Belanja Barang	B.4	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64	37.050.000.000
Belanja Modal	B.5	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81	18.690.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	600.000.000	600.200.000	100,03	420.000.000
JUMLAH BELANJA		93.300.000.000	90.812.700.000	97,33	75.360.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

II. NERACA

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18.000.000	6.000.000
Kas pada BLU	C.3	990.000.000	1.500.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	120.000.000	54.000.000
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	357.500.000	112.540.000
Piutang PNB	C.6	450.500.000	332.100.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	216.000.000	144.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	72.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	(15.377.500)	(2.668.500)
Belanja Dibayar di Muka	C.10	811.644.000	780.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	483.850.250	653.120.000
Persediaan	C.12	5.100.000.000	3.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		8.664.116.750	6.836.691.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	432.000.000	144.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	344.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	(13.000.000)	(1.008.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		763.000.000	200.592.000
ASET TETAP			
Tanah	C.16	36.300.000.000	18.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.17	12.983.885.000	6.300.000.000
Gedung dan Bangunan	C.18	47.970.000.000	42.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	2.040.000.000	300.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.20	630.000.000	540.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	2.250.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(17.491.644.250)	(14.111.664.250)
Jumlah Aset Tetap		84.682.240.750	53.028.335.750
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	1.641.000.000	625.700.000
Aset Lain-Lain	C.24	1.170.000.000	960.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(310.000.000)	(180.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		2.501.000.000	1.405.700.000
JUMLAH ASET		96.610.357.500	61.471.919.250
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	423.000.000	55.400.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	337.079.000	186.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	288.400.000	55.123.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	925.000.000	549.935.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	354.500.000	455.440.250
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.387.979.000	1.301.898.750
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	2.531.800.000	3.255.042.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.531.800.000	3.255.042.000
JUMLAH KEWAJIBAN		4.919.779.000	4.556.940.750
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH EKUITAS		91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			



III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		1.539.000.000	-
Pendapatan Badan Layanan umum		2.426.200.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.965.200.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	19.820.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	12.000.000.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.614.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	2.200.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.087.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	4.050.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	600.200.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.510.000.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(24.701.000)	-
JUMLAH BEBAN		59.856.499.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		72.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(9.000.000)	-
Surplus Defisit (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(25.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		252.000.000	-
Beban Luar Biasa		(372.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(120.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(57.651.299.000)	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 270 -

IV: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	56.914.378.500	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(56.000.500.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	300.000.000	-
Koreksi Atas Nilai Aset Tetap	E.4	773.885.000	-
Koreksi Atas Beban	E.5	330.115.000	-
Koreksi Atas Pendapatan	E.6	(90.000.000)	-
Koreksi Lain-lain -- Hibah Masuk/Keluar	E.7	1.500.000.000	-
Jumlah		2.814.000.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		87.962.700.000	-
EKUITAS AKHIR	E.8	91.690.578.500	56.914.378.500



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor: 6, Jakarta Pusat.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui impementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual”***.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BAPK) terdiri dari 4 Deputi yaitu:

1. Sekretariat Utama

Deputi yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa.

2. Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi

Bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

4. Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Bertanggungjawab terhadap pembinaan sistem dan kebijakan akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian jumlah satker pada masing-masing eselon I adalah sebagai berikut:

No.	Eselon I	Satker
1	Deputi Administrasi BAPK	12
2	Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	2
3	Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi	1
4	Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5
Jumlah		20

Termasuk di dalam jumlah satker pada Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah dua satker BLU yaitu BLU Pusat Akuntansi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 276 -

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 284 -

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	2.100.000.000	2.100.000.000
Pendapatan Lain-lain	150.000.000	150.000.000
Jumlah Pendapatan	2.250.000.000	2.250.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	19.000.000.000	19.000.000.000
Belanja Barang	55.500.000.000	40.400.000.000
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	600.000.000
Belanja Modal	17.500.000.000	33.300.000.000
Jumlah Belanja	92.600.000.000	93.300.000.000

Sedangkan apabila dilihat dari program BAPK maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PPROGRAM	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Percepatan Implemetasi Akuntansi Berbasis Akruai	40.700.000.000	40.600.000.000
Program Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan Keuangan	31.400.000.000	32.000.000.000
Program Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Akuntansi pada KL	20.500.000.000	20.700.000.000
Total Belanja	92.600.000.000	93.300.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp2.850.000.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.850.000.000 atau mencapai 126,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.100.000.000	2.285.000.000	108,81
Pendapatan Lain-lain	150.000.000	565.000.000	376,67
Jumlah	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67

Realisasi Pendapatan TA 2015 di atas estimasi pendapatan disebabkan oleh bertambahnya permintaan jasa pelatihan akuntansi dan manajemen dari yang direncanakan. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2015 dibandingkan dengan TA 2014 terdapat kenaikan sebesar 15,38 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Jasa Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Manajemen seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	2.285.000.000	1.460.000.000	56,51
Pendapatan Lain-lain	565.000.000	490.000.000	15,31
Jumlah	2.850.000.000	1.950.000.000	46,15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

Realisasi Belanja **B.2. BELANJA**

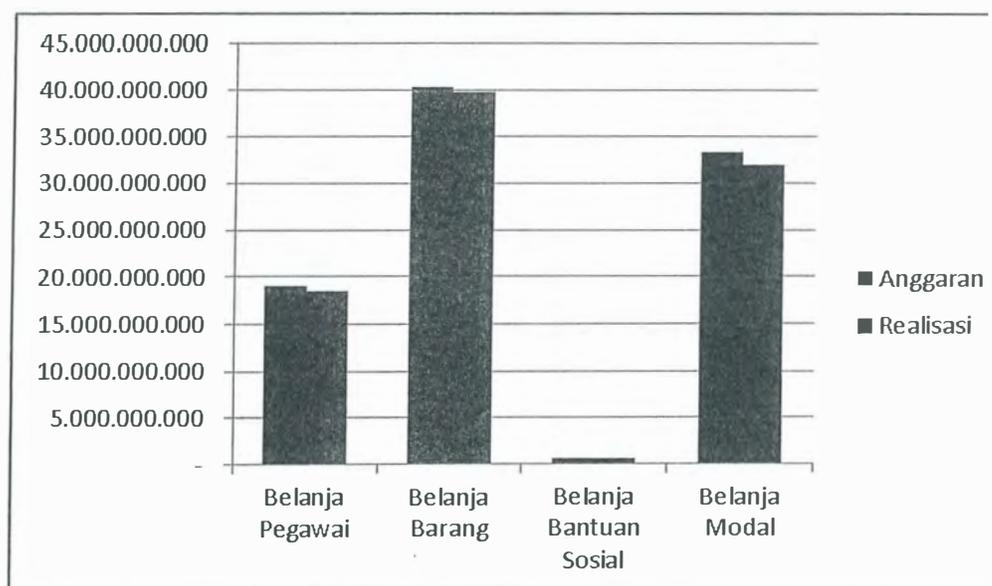
Rp90.812.700.000

Realisasi Belanja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada TA 2015 adalah sebesar Rp90.812.700.000 atau 97,33% dari anggaran belanja sebesar Rp93.300.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	19.000.000.000	18.607.200.000	97,93
Belanja Barang	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	600.200.000	100,03
Belanja Modal	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81
Total Belanja Kotor	93.300.000.000	90.962.700.000	97,49
Pengembalian Belanja	-	(150.000.000)	
Total Belanja	93.300.000.000	90.812.700.000	97,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2015

PPROGRAM	2015		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Percepatan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	39.000.000.000	38.700.000.000	99,23
Program Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan Keuangan	33.300.000.000	31.412.700.000	94,33
Program Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Akuntansi pada KL	21.000.000.000	20.700.000.000	98,57
Total Belanja	93.300.000.000	90.812.700.000	97,33

Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,51% dibandingkan pada TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

3. Meningkatnya kebutuhan belanja barang sebagai akibat dari implementasi akuntansi berbasis akrual,
4. Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis,
5. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.457.200.000	19.200.000.000	(3,87)
Belanja Barang	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56
Belanja Bantuan Sosial	600.200.000	420.000.000	42,90
Belanja Modal	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70
Jumlah	90.812.700.000	75.360.000.000	20,51



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

Belanja Pegawai

Rp18.457.200.000

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp18.457.200.000 dan Rp19.200.000.000 atau terjadi penurunan sebesar 3,87% dari TA yang lalu. Penurunan ini disebabkan oleh antara lain berkurangnya jumlah pegawai akibat pensiun.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.533.000.000	14.440.000.000	(6,28)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.942.000.000	2.100.000.000	(7,52)
Belanja Honorarium	1.250.000.000	820.000.000	52,44
Belanja Lembur	912.200.000	750.000.000	21,63
Belanja Vakasi	970.000.000	1.180.000.000	(17,80)
Jumlah Belanja Kotor	18.607.200.000	19.290.000.000	(3,54)
Pengembalian Belanja Pegawai	(150.000.000)	(90.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	18.457.200.000	19.200.000.000	(3,87)

Belanja Barang

Rp39.851.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp39.851.000.000 dan Rp37.050.000.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 7,56 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.943.500.000	12.300.000.000	29,62
Belanja Barang Non Operasional	2.900.000.000	2.910.000.000	(0,34)
Belanja Jasa	5.300.000.000	4.440.000.000	19,37
Belanja Pemeliharaan	4.200.000.000	6.080.000.000	(30,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.457.500.000	7.900.000.000	(5,60)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	4.050.000.000	3.420.000.000	18,42
Jumlah Belanja Kotor	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	39.851.000.000	37.050.000.000	7,56



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

Belanja Modal

Rp31.904.300.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp31.904.300.000 dan Rp18.690.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 70,70% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.250.000.000	3.150.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.740.000.000	1.200.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	614.300.000	840.000.000	(26,87)
Jumlah Belanja Kotor	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	31.904.300.000	18.690.000.000	70,70

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp17.700.000.000 dan Rp9.000.000.000. Realisasi Belanja Modal Tanah diperuntukan bagi pendirian Klinik Akuntansi pada Kantor Pusat BAPK serta tanah untuk sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi di kantor vertikal BAPK. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	11.800.000.000	5.600.000.000	110,71
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	1.180.000.000	660.000.000	78,79
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	1.300.000.000	1.200.000.000	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	2.140.000.000	1.060.000.000	101,89
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.280.000.000	480.000.000	166,67
Jumlah Belanja Kotor	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.600.000.000 dan Rp4.500.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan perangkat komputer dan fasilitas pendukungnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2015 dan 2014*

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000.000	1.590.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	2.400.000.000	1.500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	300.000.000	210.000.000	42,86
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	1.800.000.000	1.200.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.250.000.000 dan Rp3.150.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 66.67 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan gedung baru untuk Klinik Akuntansi BAPK dan gedung pelatihan pada instansi vertikal BAPK.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,000,000,000	2,500,000,000	60.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	400,000,000	150,000,000	166.67
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	350,000,000	250,000,000	40.00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	350,000,000	150,000,000	133.33
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	150,000,000	100,000,000	50.00
Jumlah Belanja Kotor	5,250,000,000	3,150,000,000	66.67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	5,250,000,000	3,150,000,000	66.67

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.740.000.000 dan Rp1.200.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014.

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	1,560,000,000	1,080,000,000	44.44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	180,000,000	120,000,000	50.00
Jumlah Belanja Kotor	1,740,000,000	1,200,000,000	45.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	1,740,000,000	1,200,000,000	45.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp614.300.000 dan Rp840.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami penurunan sebesar 26,87 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Hal ini disebabkan ketiadaan pengadaan belanja modal lainnya, melainkan hanya berupa perbaikan-perbaikan dan *updating*.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	494.300.000	770.000.000	-35,81
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	120.000.000	70.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	614.300.000	840.000.000	-26,87
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	614.300.000	840.000.000	-26,87



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 294 -

Belanja Bantuan Sosial **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Sosial

Rp600.200.000

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp600.200.000 dan Rp420.000.000. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Sekretariat Utama	300.200.000	210.000.000	42,95
Penerima Bantuan melalui Deputi Sistem	120.000.000	90.000.000	33,33
Penerima Bantuan melalui Deputi LKPP	180.000.000	120.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	600.200.000	420.000.000	42,90
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	600.200.000	420.000.000	42,90

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp60.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2015 dan 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai	20.000.000	0
Rekening Bank	40.000.000	0
Jumlah	60.000.000	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp18.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp18.000.000. dan Rp6.000.000, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2015 dan 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai	3.000.000	3.000.000
Rekening Bank	15.000.000	3.000.000
Jumlah	18.000.000	6.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

Kas pada BLU
Rp990.000.000

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp990.000.000 dan Rp1.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas di BLU TA 2015 dan 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai	104.500.000	550.000.000
Rekening Bank	885.500.000	950.000.000
Jumlah	990.000.000	1.500.000.000

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp120.000.000

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp54.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015 dan 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	16.500.000	8.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	35.000.000	20.000.000
Kas Lainnya dari Hibah	68.500.000	25.500.000
Jumlah	120.000.000	54.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada eselon I disajikan dalam lampiran.

*Investasi Jangka
Pendek BLU
Rp357.500.000*

C.5 Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp357.500.000 dan Rp112.540.000, merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU, disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2015 dan 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Deposito	262.140.000	112.540.000
SBN	95.360.000	-
Jumlah	357.500.000	112.540.000

*Piutang PNBP
Rp450.500.000*

C.6 Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp450.500.000 dan Rp332.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2015 dan 2014

Uraian	TH 2015	TH 2014
Piutang PNBP	350.000.000	300.000.000
Piutang Lainnya	100.500.000	32.100.000
Jumlah	450.500.000	332.100.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBK pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I disajikan pada lampiran.

Bag Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp216.000.000

**C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp216.000.000 dan Rp144.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2015 dan
2014*

No	Nama	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Bagian Lancar TP	100.000.000	50.000.000
2	Bagian Lancar TGR	116.000.000	94.000.000
Jumlah		216.000.000	144.000.000

Rincian TP/TGR untuk masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 299 -

*Bagian Lancar
TPA
Rp72.000.000*

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp57.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA per eselon I disajikan pada lampiran.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –Piutang
Lancar
Rp15.377.500*

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp15.377.500 dan Rp2.668.500. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA
2015*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	370.500.000	0,50%	1.852.500
Kurang Lancar	80.000.000	10%	8.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	450.500.000		9.852.500
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	181.000.000	0,50%	905.000
Kurang Lancar	35.000.000	10%	3.500.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	216.000.000		4.405.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	64.000.000	0,50%	320.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	72.000.000		1.120.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	738.500.000		15.377.500

Beban Dibayar di Muka **C.10 Beban Dibayar di Muka**

Muka

Rp811.644.000

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp811.644.000. dan Rp780.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2015 dan
2014*

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pembayaran Internet	170.000.000	150.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	350.000.000	320.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	291.644.000	310.000.000
Jumlah	811.644.000	780.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 301 -

Rincian Beban Dibayar di Muka berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp483.850.250*

C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp483.850.250 dan Rp653.120.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015 dan 2014

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	285.000.000	85.000.000
Pendapatan Jasa Pelatihan	120.000.000	215.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	78.850.250	353.120.000
Jumlah	483.850.250	653.120.000

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I disajikan dalam lampiran.

*Persediaan
Rp5.100.000.000*

C.12 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp5.100.000.000. dan Rp3.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014

Persediaan	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	2.200.000.000	850.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	900.000.000	900.000.000
Suku cadang	900.000.000	600.000.000
Persediaan Lainnya	1.100.000.000	850.000.000
Jumlah	5.100.000.000	3.200.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp115.000.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan

/Tuntutan Ganti

Rugi

Rp432.000.000

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp432.000.000 dan Rp144.000.000. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian per eselon I disajikan dalam lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp344.000.000*

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp344.000.000. dan Rp57.600.000, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per eselon 1 disajikan dalam lampiran.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp13.000.000*

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.000.000 dan Rp1.008.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	370.000.000	0,50%	1.850.000
Kurang Lancar	62.000.000	10%	6.200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	432.000.000		8.050.000
Tagihan PA			
Lancar	310.000.000	0,50%	1.550.000
Kurang Lancar	34.000.000	10%	3.400.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	344.000.000		4.950.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	776.000.000		13.000.000

Tanah

Rp36.300.000.000

C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp36.300.000.000. dan Rp18.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	18.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	17.700.000.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	36.300.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	36.300.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2015 berlokasi di tiga provinsi yaitu: Medan, Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat tanah pada Sekretariat Utama BAPK seluas 3.000M2 senilai Rp3.000.000.000 pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin
Rp12.983.885.000*

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.983.885.000 dan Rp6.300.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	6.300.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.600.000.000
Hibah	Rp	900.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	150.000.000
Koreksi Pencatatan	Rp	277.885.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(300.000.000)
Penghapusan	Rp	(650.000.000)
Transfer Keluar	Rp	(100.000.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(194.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	12.983.885.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	(3.557.044.250)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	9.426.840.750

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa:
 1. Komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp600.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

2. Alat angkutan darat bermotor dengan total nilai sebesar Rp6.000.000.000.

- Hibah berupa:

Alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.

- Reklasifikasi masuk berupa:

Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp150.000.000.

- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000

Mutasi kurang:

- Penghentian aset berupa:

Penghentian peralatan dan mesin berupa alat pemancar dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.

- Penghapusan berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	250.000.000
4	Komputer Unit	250.000.000
5	Peralatan Komputer	150.000.000
Jumlah		650.000.000

- Transfer keluar berupa:

Komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp100.000.000 ke Komite Akuntansi Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

- Koreksi pencatatan berupa:
Pengurangan melalui koreksi karena kesalahan pencatatan senilai Rp194.000.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2015 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp47.970.000.000*

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp47.970.000.000 dan Rp42.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	42,000,000,000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	5,250,000,000
Koreksi pencatatan	900,000,000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(180,000,000)
Saldo per 31 Desember 2015	47,970,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(13,290,600,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	34,679,400,000

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung berupa, pembanguan dua gedung yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
- Koreksi tambah sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

Mutasi kurang:

- Koreksi kurang sebesar Rp180.000.000 berasal dari biaya pemeliharaan tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk musholla yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Badan akuntansi dan Pelaporan keuangan dan pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.040.000.000

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan Rp300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	300.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	1.740.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	2.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	1.654.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi di seluruh lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp630.000.000*

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp630.000.000 dan 540.000.000.

Saldo per 31 Desember 2014	540,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	120,000,000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(30,000,000)
Saldo per 31 Desember 2015	630,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(258,000,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	372,000,000

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2015 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp120.000.000 termasuk di dalamnya adalah pembelian alat musik tradisional sebesar Rp25.000.000 dan koleksi buku perpustakaan senilai Rp95.000.000.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

Mutasi kurang:

- Pengurangan Rp30.000.000 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp2.250.000.000

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.250.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp17.491.644.250

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp17.491.644.250 dan Rp14.111.664.250.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.983.885.000	3.557.044.250	9.426.840.750
2	Gedung dan Bangunan	47.970.000.000	13.290.600.000	34.679.400.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.040.000.000	386.000.000	1.654.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	630.000.000	258.000.000	372.000.000
Akumulasi Penyusutan		63.623.885.000	17.491.644.250	46.132.240.750

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud

Rp1.641.000.000

C.23 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp1.641.000.000 dan Rp625.700.000, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud TA 2015 dan 2014

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	1.240.000.000
2	Paten	401.000.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2014		1.641.000.000
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2015		(120.000.000)
Jumlah		1.521.000.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

Saldo per 31 Desember 2014	625.700.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	794.300.000
Transfer Masuk	221.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	1.641.000.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2015	(120.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	1.521.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi manajemen database mahasiswa pada BLU di lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Mutasi Kurang:

- Berupa koreksi atas kesalahan pencatatan pada tahun yang lalu.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran.

Aset Lain-Lain

Rp1.170.000.000

C.24 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.170.000.000 dan Rp960.000.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Perbandingan Rincian Aset Lain-lain TA 2015

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	441.251.000
2	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	728.749.000
	Jumlah	1.170.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2014	Rp	660.000.000
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	750.000.000
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	(150.000.000)
- penghapusan BMN	Rp	(90.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.170.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(190.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	980.000.000

Mutasi tambah:

- Penambahan dari reklasifikasi aset tetap melalui penghentian peralatan dan mesin dari penggunaannya sebesar Rp200.000.000 dan. Peralatan dan mesin tersebut berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	50.000.000
2	Alat Studio	65.000.000
3	Alat Kesehatan Umum	45.000.000
4	Komputer Unit	5.000.000
5	Peralatan Komputer	35.000.000
Jumlah		200.000.000

- Penambahan dari reklasifikasi aset tetap melalui usulan penghapusan sebesar Rp550.000.000 berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	350.000.000
4	Komputer Unit	150.000.000
5	Peralatan Komputer	50.000.000
Jumlah		550.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

Mutasi kurang:

- Berupa reklasifikasi dari aset lainnya ke peralatan dan mesin merupakan pengaktifan kembali komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp150.000.000.
- Berupa penghapusan sebesar Rp90.000.000 merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp310.000.000*

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp310.000.000 dan Rp180.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.240.000.000	80.000.000	1.160.000.000
2	Paten	401.000.000	40.000.000	361.000.000
	Jumlah	1.641.000.000	120.000.000	1.521.000.000
B	Aset Lainnya	1.170.000.000	190.000.000	980.000.000
	Jumlah	1.170.000.000	190.000.000	980.000.000
	Total	2.811.000.000	310.000.000	2.501.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

*Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.000.*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp423.000.000*

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp423.000.000 dan Rp55.400.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp337.079.000*

C.28 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp337.079.000 dan Rp186.000.000, merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin, yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan pada lampiran.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp288.400.000*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp288.400.000 dan Rp55.123.000. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp925.000.000*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp925.000.000 dan Rp549.935.500. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupa jasa pelatihan dan penyusunan neraca awal belum selesai dilaksanakan hingga tanggal pelaporan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada lampiran.

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2015

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	425.000.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	342.500.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	157.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	925.000.000	

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

*Beban yang
Masih harus
Dibayar
Rp354.500.000*

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp354.500.000 dan Rp455.440.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2015 dan TA 2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	42.745.000	139.000.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	184.755.000	164.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	127.000.000	152.350.000
Jumlah	354.500.000	455.440.000

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran.

*Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri
Rp2.531.800.000*

C.32 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.531.800.000 dan Rp3.255.042.000. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri berasal dari pembelian peralatan dan mesin, dan berada pada satker BLU di bawah Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
TA 2015 dan TA 2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
BLU Pusat Nasional Akuntansi	1.593.300.000	2.755.042.000
Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional	938.500.000	500.000.000
Jumlah	2.531.800.000	3.255.042.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 318 -

Ekuitas

Rp91.690.578.500

C.33 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp91.690.578.500 dan Rp56.914.378.500. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp3.965.200.000

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.965.200.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	395.000.000		
Pendapatan Jasa Pelatihan	660.480.000		
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	27.542.000		
Jumlah Pendapatan Jasa	1.083.022.000		
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	123.540.000		
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	332.438.000		
Jumlah Pendapatan Lain-lain	455.978.000		
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	1.539.000.000		
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	2.426.200.000		
Jumlah Pendapatan BLU	2.426.200.000		
Jumlah	3.965.200.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp19.820.000.000

Beban Pegawai untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.820.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	15.487.740.000	-	-
Beban Honorarium dan vakasi	3.409.960.000	-	-
Beban Lembur	922.300.000	-	-
Jumlah	19.820.000.000	-	-

Beban

Persediaan

Rp12.000.000.000

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8.261.000.000	-	-
Beban Persediaan Pemeliharaan	1.194.100.000	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	1.980.900.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	564.000.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	12.000.000.000	-	-

Beban Barang

dan Jasa

Rp7.614.000.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.614.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 320 -

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan
TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	2.287.400.000		
Beban Barang Nonoperasional	764.410.000		
Beban Langganan Daya dan Jasa	635.411.000		
Beban Jasa Pos dan Giro	312.934.000		
Beban Jasa Konsultan	475.095.000		
Beban Sewa	809.250.000		
Beban Jasa Profesi	615.000.000		
Beban Jasa Lainnya	400.500.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	712.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	360.000.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	242.000.000		
Jumlah	7.614.000.000		

Beban

Pemeliharaan

Rp2.200.000.000

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.200.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA
2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.130.000.000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	691.200.000		
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87.800.000		
Beban Pemeliharaan Lainnya	291.000.000		
Jumlah	2.200.000.000		

Beban

Perjalanan Dinas

Rp10.087.000.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.087.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 321 -

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan
TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.871.000.000		
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.216.000.000		
Jumlah	10.087.000.000		

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp4.050.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.050.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	684.000.000		
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.860.000.000		
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.506.000.000		
Jumlah	4.050.000.000		

- Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa P.C Unit dan peralatan komputer.
- Beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa buku-buku antara lain Standar Akuntansi Pemerintahan, Dasar-Dasar Akuntansi dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, serta peralatan pengajaran.



*Beban Bantuan
Sosial
Rp600.200.000*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp600.200.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan
TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	90.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	217.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	293.200.000	-	-
Jumlah	600.200.000	-	-

- Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dimaksud dalam bentuk biaya perbaikan sekolah di daerah terpencil.
- Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial berupa pelatihan kepada masyarakat tidak mampu.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.510.000.000*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.510.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA
2015 dan TA 2014*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.102.350.000	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	959.400.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	205.750.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	112.500.000	-	-
Jumlah Penyusutan	3.380.000.000	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi	40.000.000	-	-
Beban Amortisasi Paten	90.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	130.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.510.000.000	-	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp24.701.000*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp24.701.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA
2015 dan TA 2014*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	12.709.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	11.992.000	-	-
Jumlah	24.701.000	-	-

*Kegiatan Non
Operasional
Rp38.000.000*

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 324 -

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015
dan TA 2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor	72.000.000		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	(9.000.000)		
Defisit dari kegiatan operasional lainnya	(25.000.000)		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	38.000.000		

*Pos Luar Biasa
Rp120.000.000*

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pos Luar Biasa TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	252.000.000		
Beban Perjalanan Dinas	(152.000.000)		
Beban Persediaan	(220.000.000)		
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	(120.000.000)		

Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan berasal dari biaya perjalanan dinas yang dihabiskan dan jumlah persediaan yang terpakai secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 325 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp56.914.378.500

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp56.914.378.500 dan Rp0.

Defisit LO

Rp56.000.500.000

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp56.000.500.000 dan Rp0.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp300.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp0. Rincian koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Rincian Koreksi Persediaan TA 2015

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	150.000.000
2. Suku Cadang	45.000.000
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	90.000.000
4. Barang Persediaan Lainnya	15.000.000
Jumlah	300.000.000

Koreksi Aset

Tetap

Rp773.885.000

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi aset tetap dan aset lainnya untuk tahun 2015 dan 2014 adalah koreksi kurang masing-masing sebesar Rp773.885.000 dan Rp0.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 326 -

Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Rincian Koreksi Aset Tetap TA 2015

Jenis Koreksi	Nilai
Koreksi tambah	
Peralatan dan Mesin	277.885.000
Gedung dan Bangunan	900.000.000
Jumlah Koreksi Tambah	1.177.885.000
Koreksi Kurang	
Peralatan dan Mesin	(194.000.000)
Gedung dan Bangunan	(180.000.000)
Aset Tetap Lainnya	(30.000.000)
Jumlah Koreksi Kurang	(404.000.000)
Jumlah	773.885.000

*Koreksi Atas
Beban
Rp330.115.000*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah koreksi kurang masing-masing sebesar Rp330.115.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Rincian Koreksi Beban TA 2015

Jenis Beban	Koreksi
Beban Pegawai	180.000.000
Beban Jasa	95.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	55.115.000
Jumlah	330.115.000

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp90.000.000*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

Koreksi kurang atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp90.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Rincian Koreksi Pendapatan TA 2015

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Pendapatan Jasa	(60.000.000)
Pendapatan Lain-Lain	(30.000.000)
Jumlah	(90.000.000)

Koreksi Nilai

Hibah

Masuk/Keluar

Rp1.500.000.000

E.7 Koreksi Nilai Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Nilai Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar TA 2015

Jenis Koreksi	Nilai
Hibah	
Tanah	600.000.000
Peralatan dan Mesin	900.000.000
Jumlah	1.500.000.000

Ekuitas Akhir

Rp91.690.578.500

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp91.690.578.500 dan Rp56.914.378.500.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 328 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Papua	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Okto
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Kantor Akuntansi Istimewa Denpasar	Kuasa Pengguna Anggaran	Astuti	Acelin Kamila
	Pejabat Pembuat Komitmen	Tira	Sugi
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Silvina	Fathin
	Bendahara	Imam	Aydin
Kantor Akuntansi Istimewa Medan	Kuasa Pengguna Anggaran	Fitriani	Wulandari
	Pejabat Pembuat Komitmen	Yudhi	Zafian
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Hastuti	Rizvan
	Bendahara	Atmaja	Kamila



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2014	Beban Peny. Tahun 2015	Akm. Peny. Per 31-12-2015	Nilai Buku Per 31-12-2015
A	Tanah						
1	Tanah	-	36.300.000.000	-	-	-	36.300.000.000
	Jumlah		36.300.000.000				36.300.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.400.000.000	374.550.000	200.000.000	574.550.000	825.450.000
2	Alat Kantor	6	4.077.885.000	203.894.260	623.600.000	726.394.260	3.351.490.750
3	Alat Rumah Tangga	6	3.991.000.000	430.000.000	572.350.000	1.002.350.000	2.988.650.000
4	Alat Komunikasi	6	850.000.000	85.000.000	170.000.000	255.000.000	595.000.000
5	Komputer Unit	4	1.200.000.000	150.000.000	300.000.000	450.000.000	750.000.000
6	Peralatan Komputer	4	1.250.000.000	188.260.000	312.000.000	408.760.000	781.250.000
7	Peralatan Olahraga	9	215.000.000	85.000.000	25.000.000	80.000.000	135.000.000
	Jumlah		12.983.885.000	1.454.694.260	2.102.350.000	3.557.044.260	9.426.840.750
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	22.970.000.000	5.831.200.000	439.400.000	6.290.600.000	16.679.400.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	25.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	7.000.000.000	18.000.000.000
	Jumlah		47.970.000.000	12.331.200.000	959.400.000	13.290.600.000	34.679.400.000
C	Jaringan, Irigasi, dan Jalan						
1	Jaringan Listrik	40	250.000.000	50.000.000	10.250.000	72.000.000	177.500.000
2	Jaringan Telepon	20	1.700.000.000	124.000.000	189.000.000	313.000.000	1.476.500.000
	Jumlah		2.040.000.000	180.250.000	205.750.000	386.000.000	1.654.000.000
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang Berwujud Kosong	4	450.000.000	147.500.000	112.500.000	268.000.000	192.000.000
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah		630.000.000	147.500.000	112.500.000	268.000.000	372.000.000
E	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	2.250.000.000	-	-	-	2.250.000.000
	Jumlah		2.250.000.000				2.250.000.000
F	Aset Lainnya						
1	Aset Tidak Berwujud*	-	1.641.000.000	80.000.000	40.000.000	120.000.000	1.521.000.000
2	Aset Lain-lain	-	1.170.000.000	180.000.000	90.000.000	190.000.000	980.000.000
	Jumlah		2.811.000.000	260.000.000	130.000.000	310.000.000	2.501.000.000
	Total		104.984.885.000	14.291.644.260	3.510.000.000	17.801.644.260	87.183.240.750

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	KDP	Satker	No Kontrak	Nilai Kontrak	% Pnyles	Nilai KDP	Sumber Dana
1	Gedung Tempat Kerja	KAI Jakarta	No.02/KPA/VII/2015	1.100.000.000	80%	880.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	KAI Bali	No.07/KPA/VII/2015	672.222.000	90%	605.000.000	Rupiah Murni
3	Gedung Tempat Tinggal	KAI Bali	No.08/KPA/VIII/2015	300.000.000	75%	225.000.000	Rupiah Murni
4	Gedung Tempat Tinggal	KAI Papua	No.12/KPA/XII/2015	600.000.000	90%	540.000.000	Pinj.LN
	Jumlah			2.672.222.000		2.250.000.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001